

**DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA
SOSIAL EKONOMI DESA DI DESA PONGGI
KECAMATAN POREHU KABUPATEN
KOLAKA UTARA**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian
Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*



IAIN PALOPO

OLEH :

Fadil Rizat Giofani
2004030166

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA
SOSIAL EKONOMI DESA DI DESA PONGGI
KECAMATAN POREHU KABUPATEN
KOLAKA UTARA**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian
Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*



IAIN PALOPO

OLEH :

Fadil Rizat Giofani
2004030166

Pembimbing:
Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadil Rizat Giovani
NIM : 20 0403 0166
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab peneliti.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



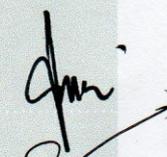
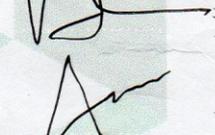
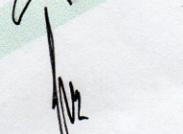
Fadil Rizat Giovani
NIM. 20 0403 0166

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Dampak Pembangunan Infrastruktur pada Sosial Ekonomi Desa di Desa Ponggi Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara yang ditulis oleh Fadil Rizat Giofani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004030166, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 Miladiyah bertepatan dengan 10 Ramadhan 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 20 Maret 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Burhan Rifuddin, S.E., M.M. | Penguji I | () |
| 4. Andi Musniwan Kasman, S.E., M.M. | Penguji II | () |
| 5. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. | Pembimbing | () |

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009012006



Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Abbar Saifurrahman, S.E.I., M.E.I.
NIP. 198005048501

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas kasih sayang-Nya, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah pada pemimpin para nabi dan rasul, baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Skripsi ini berjudul "**Dampak Sosial Ekonomi Pada Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara**". Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi penyelesaian studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta Kamri dan ibunda tercinta Suharni yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik saya dengan penuh rasa kasih sayang. Semoga dengan gelar sarjana ini menjadi awal saya untuk dapat membahagiakan ayah dan ibu di dunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini terselesaikan berkat adanya bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak. Maka tak lupa dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, terkhusus kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Anita Marwing, MHI., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, SE., ME.I., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muzayyanah Jabani, ST., MM., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Akbar Sabani, S.EI., M.E. dan Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Hamida, S.E.Sy., M.E, Sy., beserta seluruh dosen yang telah memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
4. Pembimbing Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. yang senantiasa memberikan koreksi, saran dan masukan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Penguji I Burhan Rifuddin, S.E., M.M. dan Penguji II Andi Musniwan Kasman, S.E., M.M. yang telah memberikan pertanyaan serta masukan kepada penulis.
6. Para staf yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa melayani dalam pengurus segala keperluan dalam penyelesaian studi.

7. Teman – teman seperjuangan Manajemen Bisnis Syariah kelas F IAIN Palopo yang banyak memberikan saya pelajaran dan pengalaman selama kuliah di kampus peradaban.
8. Sahabat - sahabat terbaikku dari awal kuliah sampai sekarang dan untuk selama - lamanya, kalian yang selalu mengisi hari - hari penulis selama di Kota Palopo ini. Astiara Pabianan, Rafikatul Aulia, Arul's Home dan Usaha Healiang terima kasih atas doa, semangat dan kebersamaannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan merupakan yang terbaik. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembaca. Akhir kata *billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Palopo, Februari 2025

Fadil Rizat Giofani
20 0403 0166

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKAT

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf Bahasa arab dan translitenya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'.	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	'ain	'	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawalkataa mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun,jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis denagan tanda (').

2. Vokal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
ا	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كيف: *kaifa*

هؤل: *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	A	a garis di atas
ا	<i>Kasrah dan ya'</i>	I	i garis di atas
اؤ	<i>Dammah dan wau</i>	U	u garis di atas

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt.	= <i>subhanahu wa ta `ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	=Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKAT	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II PEMBAHASAN	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Deskripsi Teori.....	14
1. Teori Modernisasi	14
2. <i>Stakeholder Theory</i>	16
3. Infrastruktur Desa	20
4. Manajemen Pembangunan	23
5. Dampak Pembangunan Infrastruktur.....	27
6. Dampak Sosial	29
7. Dampak Ekonomi	30
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Fokus Penelitian.....	34

C. Definisi Istilah.....	35
D. Subjek/Informan Penelitian.....	36
E. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data	38
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	38
I. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Desa	41
B. Hasil Penelitian.....	45
C. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian	30
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Desa Ponggi	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Meneliti
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 4	Halaman Persetujuan Pembimbing
Lampiran 5	Nota Dinas Pembimbing
Lampiran 6	Halaman Persetujuan Penguji
Lampiran 7	Nota Dinas Penguji
Lampiran 8	Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi
Lampiran 9	Turnitin
Lampiran 10	Keterangan Mahad
Lampiran 11	Sertifikat PBAK
Lampiran 12	Sertifikat Bahasa Inggris
Lampiran 13	Riwayat Hidup

ABSTRAK

Fadil Rizat Giofani, 2025. "Dampak Sosial Ekonomi pada Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Ponggi Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara". Skripsi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muzayyanah Jabani.

Penelitian ini dilakukan di Desa Seberang Ponggi Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara. Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana dampak sosial ekonomi pembangunan infrastruktur desa di Desa Seberang Ponggi Kecamatan Porehu serta apa saja hambatan dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Seberang Ponggi Kecamatan Porehu berdasarkan indikator penelitian kesejahteraan sosial, sarana dan infrastruktur, lingkungan sosial, lapangan pekerjaan baru, dan peningkatan pendapatan. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara, dokumentasi dan observasi. Informan penelitian ini adalah Aparat Pemerintah Desa Ponggi, dan Tokoh Masyarakat. Adapun jenis dan sumber data penelitian ini adalah dengan teknik analisa diskriptif kualitatif. Dimana data yang terkumpul akan dikelompokkan sesuai dengan jenis data yang akan dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur di Desa Ponggi Kecamatan Porehu yang sudah terealisasi dengan baik ialah rabat jalan, posyandu, dan drainase, sementara sebagiannya dalam tahap perencanaan. Dan sejauh ini pembangunan yang telah terealisasi dapat dinyatakan bahwa pembangunan infrastruktur desa di Desa Ponggi Kecamatan Porehu memberikan dampak sosial ekonomi dalam kategori cukup baik. Akan tetapi ada beberapa hambatan dalam pembangunan infratruktur Desa Ponggi Kecamatan Porehu ini yaitu belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, cuaca dan medan, serta harga bahan material yang tidak menentu.

Kata Kunci : *Pembangunan Infrastruktur, Sosial, Ekonomi.*

ABSTRACT

Fadil Rizat Giofani, 2025. “Socio-Economic Impact on Village Infrastructure Development in Ponggi Village, Porehu District, North Kolaka Regency”. Thesis Sharia Business Management Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muzayyanah Jabani.

This research was conducted in Seberang Ponggi Village, Porehu District, North Kolaka Regency. The author conducted research to find out how the socio-economic impact of village infrastructure development in Seberang Ponggi Village, Porehu District and what are the obstacles in village infrastructure development in Seberang Ponggi Village, Porehu District based on research indicators of social welfare, facilities and infrastructure, social environment, new jobs, and increased income. In this study the authors used data collection techniques in the form of interviews, documentation and observation. The informants of this research are Ponggi Village Government Officials, and Community Leaders. The type and source of data for this research is with qualitative descriptive analysis techniques. Where the data collected will be grouped according to the type of data to be analyzed. The results of this study indicate that the Socio-Economic Impact of Infrastructure Development in Ponggi Village, Porehu Subdistrict, which has been well realized is road rebates, posyandu, and drainage, while some are in the planning stage. And so far the development that has been realized can be stated that village infrastructure development in Ponggi Village, Porehu Sub-district has a socio-economic impact in the good enough category. However, there are several obstacles in the development of infrastructure in Ponggi Village, Porehu Sub-district, namely not maximizing the supervision carried out by the community, weather and terrain, and uncertain material prices.

Keywords: Infrastructure Development, Social, Economic.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah tetapi justru terdepan dan berada di tengah masyarakat. Program pembangunan dari pemerintah selalu bermuara ke desa, dan pelaksanaannya membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat agar berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur desa memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan infrastruktur yang memadai mendukung berbagai aktivitas ekonomi seperti transportasi, perdagangan, dan jasa.

Desa juga merupakan bagian utama dalam pembangunan di Indonesia, dengan berkembangnya desa maka secara otomatis memberikan dampak positif secara umum kepada Negara dan masyarakatnya, desa yang maju di landasi oleh prinsip gotong royong menuju kesejahteraan bersama.¹

Berbicara mengenai pembangunan desa, pembangunan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa).² Terlaksananya pembangunan desa dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa. Pelaksanaan

¹ Nur Arjani Aqidah Hendra Safri, Adzan Noor Bakri, "Pendampingan Pelatihan Aplikasi Manajemen Adminitrasi Dan Keuangan Desa Oleh Program Studi Perbankan Syariah Di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu" 4, no. 2 (2024): 12–27.

² "Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," Pub. L. No. 6 (2014).

pembangunan diawali dengan perencanaan serta perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan lembaga-lembaga masyarakat.³

Pemerintah desa telah diberikan kewenangan dan sumber dana yang cukup besar, termasuk Dana Desa yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, diberikan setiap tahun berdasarkan kriteria masing-masing desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama peningkatan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan dan penganggaran pembangunan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Pembangunan infrastruktur di desa-desa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di Desa Ponggi, pembangunan infrastruktur meliputi peningkatan dan perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum seperti pasar desa, sekolah, puskesmas, dan penyediaan air bersih. Pemerintah daerah bersama masyarakat setempat berupaya menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal, dengan harapan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup penduduk desa. Dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi

³ Feliks Arfid Guampe et al., *PEMBANGUNAN PEDESAAN (Prinsip, Kebijakan Dan Manajemen)*, Widina Bhakti Persada Bandung, vol. 3, 2022, 11.

masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Vina Maria Ompusunggu bahwa di Desa Semangat Gunung, Sumatra Utara. Ada beberapa dampak positif yaitu dengan adanya alat transportasi membantu masyarakat berbelanja dan menjual hasil panen, aktivitas lebih cepat, memudahkan jalan menuju ketempat wisata. Ada juga beberapa dampak negatif, diantaranya trotoar yang beralih fungsi menjadi tempat berdagang, retribusi yang diperoleh dari daerah tujuan wisata kurang dipergunakan dengan baik.⁴

Infrastruktur yang memadai juga akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas desa dengan wilayah lain, membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi lokal dan akses lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan infrastruktur yang memadai, masyarakat desa bisa dengan lebih mudah mengakses pasar, bahan pangan, dan kesempatan kerja, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka.⁵

Namun, program pembangunan tidak lepas dari tantangan dan hambatan, termasuk persepsi masyarakat yang memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasinya. Persepsi yang positif dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat, sementara persepsi negatif dapat menimbulkan resistensi dan menghambat proses pembangunan. Adapun 10 program yang termasuk rekomendasi Strategis Nasional (PSN) tersebut diantaranya, program smelter, program superhub, program ketenagalistrikan, program percepatan pengembangan

⁴ Vina Maria Ompusunggu, "Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo," *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 3, no. 2 (2018).

⁵ M Ihsan Darwis Mansur, Muhammad Tahmid Nur, Fasiha, "Kebijakan Dana Desa Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Perspektif Al Maslahah Al Mursalah" 14 (2024): 123-36.

wilayah, program pemerataan ekonomi, program akses exit tol, program penyediaan pangan, program kawasan strategi pariwisata, program instalasi pengolahan sampah, program kawasan perbatasan. Kemudian 201 proyek yang direkomendasikan salah satunya ialah, 54 proyek jalan, 9 proyek irigasi dan 1 proyek pendidikan.⁶

Masalah umum dalam pengembangan infrastruktur desa meliputi akses jalan yang tidak memadai, infrastruktur telekomunikasi terbatas, dan tantangan perubahan iklim seperti banjir atau kekeringan. Perencanaan kebijakan yang bijaksana, sumber daya yang memadai, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur di pedesaan merupakan langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini terlihat dari berbagai proyek pembangunan jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang diharapkan mampu menghubungkan desa dengan pusat ekonomi serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Namun, seringkali pembangunan ini menghadapi kendala berupa kurangnya partisipasi masyarakat, persepsi negatif terhadap proyek pemerintah, dan ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat lokal dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan. Masyarakat kadang menganggap proyek-proyek tersebut tidak memenuhi kebutuhan utama mereka atau tidak merata dalam pelaksanaannya, yang menimbulkan ketidakpuasan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa penting untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek agar

⁶ Anonim, "Infrastruktur akan meningkat ditahun 2021". Diakses pada, Jumat 2 Juli 2020. <https://graduate.binus.ac.id/2021/04/22/infranstruktur-tahun-2021>.

pembangunan infrastruktur tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga dirasakan adil dan relevan oleh masyarakat desa.

Demikian pula halnya dengan ekonom Barat yang mencoba memformulasikan strategi pembangunan dalam suatu kerangka teori yang sistematis, dimana dasar dari teori yang mereka hanya dapat terpenuhi bila teori tersebut diterapkan di Barat. Itulah sebabnya mengapa teori-teori pembangunan yang merupakan hasil pemikiran ekonom Barat, pada banyak kasus ternyata kurang tepat diterapkan begitu saja di Negara sedang berkembang (NSB). Perbedaan tata nilai, sistem sosial, dan kondisi lingkungan antar negara maju, yang umumnya di benua Eropa dan Amerika, dengan NSB (Negara sedang berkembang) yang umumnya terletak di benua Afrika dan Asia, menyebabkan penerapan teori-teori pembangunan yang ada banyak yang menjumpai "kegagalan".⁷

Efektivitas manajemen desa berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks manajemen bisnis, prinsip-prinsip seperti perencanaan strategis, pengawasan, dan kolaborasi sangat relevan. Manajemen yang baik, yang meliputi perencanaan partisipatif dan pengawasan yang ketat, menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa terlibat dan memiliki kontrol atas proses pembangunan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab, yang pada gilirannya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur. Pemberdayaan masyarakat juga

⁷ Mudrajad Kuncoro, *Dasar Dasar Ekonomika Pembangunan* (Yogyakarta UPP STIM YKPN, 1991.), 86.

berfungsi sebagai pendorong efektivitas manajemen desa. Ketika masyarakat diberdayakan, mereka lebih cenderung untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas proyek, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam konteks manajemen bisnis, ini mirip dengan konsep "*stakeholder engagement*", di mana melibatkan semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan keberhasilan proyek.⁸

Perbedaan ini mengisyaratkan bahwa Desa bukan penanggung jawab administratif dalam pengertian Desa mendapatkan kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab terhadap Bupati/Walikota, namun Desa melaksanakan tugas umum Pemerintahan di wilayah Desa, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi Pemerintah, penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, penegakan Peraturan Perundang-Undangan, pembinaan dan lain sebagainya diisyaratkan melakukan koordinasi kepada Camat sebagai penanggung jawab sektor wilayah dari Kecamatan. Koordinasi yang dimaksudkan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan Pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang efektif dan efisien.

⁸ Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing, 24.

Keterbatasan kewenangan yang dimiliki Desa ini akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di tingkatan Desa.⁹

Masyarakat Desa Ponggi memiliki peran penting dalam pelaksanaan program pembangunan desa, mengawasi pelaksanaan program, dan memastikan transparansi serta kinerja pemerintah desa. Masyarakat perlu terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, memberikan *feedback* terhadap kebijakan, dan memastikan bahwa program dijalankan sesuai keinginan masyarakat desa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka Utara, infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan data BPS, panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.200 km dengan 65% dalam kondisi baik, serta 120 jembatan yang 85% di antaranya dalam kondisi layak pakai, telah memperlancar distribusi barang dan hasil pertanian antarwilayah. Selain itu, 92% rumah tangga di Kolaka Utara kini memiliki akses listrik, yang mendukung perkembangan usaha kecil menengah. Pembangunan jaringan irigasi sepanjang 80 km yang telah diperbaiki turut mendukung peningkatan hasil pertanian, yang merupakan sektor utama ekonomi lokal.¹⁰

Desa Ponggi, yang terletak di Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, merupakan salah satu desa yang saat ini tengah mendapatkan perhatian dalam hal pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi meliputi peningkatan dan perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum seperti

⁹ Okparizan Doni Septian, "Kewenangan Desa Pasca Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah", Vol.1 No.2 Februari 2017, 739.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara, "Statistik Daerah Kabupaten Kolaka Utara 2022," BPS Kabupaten Kolaka Utara, 2022.

pasar desa, sekolah, puskesmas, dan penyediaan air bersih. Kekhawatiran utama mengenai infrastruktur di Desa Ponggi Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara termasuk kurangnya pemahaman di antara pejabat desa dalam perencanaan kegiatan infrastruktur, yang mengarah pada kebutuhan peningkatan keterampilan dalam gambar teknis dan perangkat lunak. Selain itu, ada masalah kekurangan sumber daya manusia dan kemampuan di antara aparatur desa dalam menyusun peraturan desa, yang sangat penting untuk menjaga ketertiban dan perdamaian masyarakat.

Selain itu, masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam hal perencanaan tetapi juga dalam hal pelaksanaan program-program pembangunan desa. Masyarakat dapat memberikan *feedback outcomes* terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Berdasarkan observasi awal dari peneliti, masyarakat di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara memandang infrastruktur desa dengan tingkat kepuasan dan kepentingan yang berbeda-beda. Selain itu, penelitian tentang Program PNPM RESPEK di Papua dan Papua Barat menekankan pentingnya membangun infrastruktur berkualitas yang dimanfaatkan secara efektif, menyoroti pentingnya infrastruktur dalam pembangunan masyarakat dan kesejahteraan.¹¹

Dari pemaparan tersebut sangatlah penting peran pemerintah untuk memberikan kesenjangan hidup kepada masyarakat agar masyarakat setempat

¹¹ Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori Dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung* (Nusamedia, 2019), 5-6.

dapat hidup sejahtera. Melalui pembangunan infrastruktur kebijakan pemerintah desa harus mengetahui dampak sosial ekonomi masyarakat kelas bawah sampai kelas atas. Dengan cara pemetaan tersebut pemerintah dapat melihat peluang kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini penting untuk memahami **“Dampak Sosial Ekonomi Pada Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Ponggi Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus dan mendalam maka peneliti melihat masalah penelitian yang dilakukan perlu di beri batasan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis membatasi masalah penelitian dan penulis memfokuskan pada Dampak sosial ekonomi pembangunan infrastruktur yang telah terealisasi di Desa Ponggi Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara?
2. Bagaimana Dampak Sosial Ekonomi pada Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara?
3. Bagaimana Hambatan dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari batasan masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara.
2. Menganalisis dampak sosial ekonomi pada pembangunan infrastruktur desa di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara.
3. Mengidentifikasi hambatan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis:** Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang manajemen bisnis syariah dan pembangunan ekonomi desa, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. **Manfaat Praktis:** Memberikan masukan kepada pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait dampak sosial ekonomi pembangunan infrastruktur desa, sehingga dapat mengontrol pelaksanaan program pembangunan yang ada.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah salah satu referensi dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan dibutuhkan untuk perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Fathori (2023). Meneliti “*Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pembangunan Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi Lokal*”.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan diskusi kelompok terfokus dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi yang beragam tentang infrastruktur berdampak pada ekonomi lokal, dan melibatkan masyarakat sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pembangunan berkelanjutan. Adapun perbedaan dan persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah, penelitian ini meneliti dampak secara umum terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat desa Ponggi. Keduanya meneliti persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dan dampaknya pada ekonomi lokal, dan kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, termasuk wawancara untuk mengumpulkan data.

¹² Fathori, “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pembangunan Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Lokal,” *Multifinance* 1, no. 1 (2023): 20–30.

2. Nourmala Chandra Nuriyah, Sofi Nuril Lizar, dan Fuad (2023).¹³ Meneliti “*Pembangunan Infrastruktur Desa: Pemberdayaan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Desa Sumberarum Bojonegoro*”. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder, termasuk wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, analisis kebijakan, dan survei di tingkat masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi politik berdampak pada pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Pemberdayaan masyarakat meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Kualitas kepemimpinan lokal mempengaruhi kondisi pemberdayaan yang berkelanjutan, dan partisipasi aktif masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang positif. Adapun perbedaan dan persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah, Nuriyah et al. lebih menekankan pemberdayaan masyarakat dan peran kepemimpinan lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada persepsi masyarakat terhadap infrastruktur. Keduanya menggunakan data primer melalui wawancara dengan masyarakat lokal.
3. Siti Agustina, Zainuddin Saenong, dan La Tondi (2022)¹⁴. Meneliti “*Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus*

¹³ Nourmala Chandra Nuriyah and Sofi Nuril Lizar, “Pembangunan Infrastruktur Desa: Pemberdayaan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal Di Desa Sumberarum Bojonegoro Village Infrastructure Development: Community Empowerment and Its Impact on Local Economic Growth in Sumberarum Village ,” *Jurnal Suara Politik* 2, no. 2 (2023): 53–58.

¹⁴ Siti Agustina, Zainudin Saenong, and La Tondi, “Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan),” *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur* 1, no. 03 (2022): 205–215.

Di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan)”.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menilai dampak infrastruktur terhadap pendapatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembangunan infrastruktur meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan di Desa Atari Jaya. Pembangunan infrastruktur dengan melakukan revitalisasi pasar meningkatkan kebersihan, ketertiban, dan penjualan. Adapun perbedaan dan persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah, penelitian Agustina et al. secara spesifik meneliti dampak revitalisasi pasar, sementara penelitian yang akan dilakukan bisa mengeksplorasi berbagai bentuk infrastruktur dan dampaknya pada perekonomian masyarakat. Keduanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi dampak pembangunan.

4. Nurcahaya (2021)¹⁵. Meneliti “*Dampak Dana Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi pada Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara)*”. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan sumber data primer. Dalam penelitian ini mengemukakan bahwa dampak dana desa melalui pembangunan infrastruktur desa di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara menghasilkan dampak positif di kalangan masyarakat desa dan masyarakat yang mengalami dampak peningkatan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan. Adapun perbedaan dan persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah, Nurcahaya meneliti secara khusus dampak dari penggunaan dana desa,

¹⁵ Nurcahaya, “Dampak Dana Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara),” *Institut Agama Islam Negeri Palopo* (2021).

sementara penelitian yang akan dilakukan ini tidak memfokuskan pada aspek pendanaan, tetapi lebih pada persepsi masyarakat terhadap infrastruktur. Keduanya meneliti dampak pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

B. Deskripsi Teori

1. Teori Modernisasi

Teori modernisasi menjelaskan proses transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi ketika masyarakat beralih dari tradisi ke modernitas. Dalam konteks pembangunan infrastruktur desa, modernisasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, dapat mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas.

Dampak sosial ekonomi dari pembangunan infrastruktur desa sangat signifikan. Pertama, infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan industri lokal. Dengan akses yang lebih baik ke pasar, petani dan pengusaha dapat menjual produk mereka dengan harga yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka.¹⁶ Kedua, pembangunan infrastruktur juga menciptakan lapangan kerja baru, baik selama fase konstruksi maupun setelah infrastruktur selesai dibangun, yang membantu mengurangi angka pengangguran di desa. Selanjutnya, infrastruktur yang memadai berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Sekolah dan fasilitas

¹⁶ Mulyawan, S. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur. [PDF]. Diakses dari <https://etheses.uinsgd.ac.id/2594/1/Infrastruktur%20Jalan%20-%20Setia%20Mulyawan.pdf>, 20-25.

kesehatan yang lebih mudah diakses akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan layanan kesehatan, yang penting untuk pengembangan sumber daya manusia.¹⁷ Selain itu, infrastruktur yang baik juga dapat menarik investasi dari luar, yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, pembangunan infrastruktur tidak selalu berjalan mulus. Terdapat tantangan dalam proses pembebasan lahan, di mana masyarakat sering kali merasa tidak puas dengan harga ganti rugi yang ditawarkan.¹⁸ Ketidakpuasan ini dapat menimbulkan konflik sosial yang menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Manajemen bisnis di desa juga terpengaruh oleh pembangunan infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur yang baik, pelaku bisnis dapat mengoptimalkan operasional mereka, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan efisiensi. Hal ini memungkinkan mereka untuk bersaing lebih baik di pasar yang lebih luas.¹⁹ Selain itu, infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan daya tarik desa sebagai lokasi investasi, yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis lokal. Pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada pengembangan pariwisata di desa. Dengan akses yang lebih baik, desa-desa yang memiliki potensi wisata dapat menarik lebih banyak pengunjung, yang akan

¹⁷ APPISI. (2021). Modernisasi Melalui Pembangunan Menuju Kesejahteraan. [PDF]. Diakses dari <https://journal.appisi.or.id/index.php/wissen/article/download/172/274/972>, 1-5.

¹⁸ Mulyawan, S. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur. [PDF]. Diakses dari <https://etheses.uinsgd.ac.id/2594/1/Infrastruktur%20Jalan%20-%20Setia%20Mulyawan.pdf>, 14-18.

¹⁹ JIPM. (2021). Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Pembangunan Infrastruktur. [PDF]. Diakses dari <https://jipm.iigf.co.id/index.php/jipm/article/view/18/16>, 1-8.

memberikan dampak positif pada ekonomi lokal.²⁰ Namun, pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak lingkungan dan budaya lokal.

Dalam konteks modernisasi, penting untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan.²¹ Oleh karena itu, pendekatan yang holistik diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. Secara keseluruhan, teori modernisasi memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dampak sosial ekonomi dari pembangunan infrastruktur desa. Dengan pendekatan yang tepat, pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong utama bagi kemajuan sosial dan ekonomi di daerah pedesaan. Namun, tantangan yang ada harus diatasi dengan melibatkan masyarakat dan mempertimbangkan keberlanjutan dalam setiap langkah pembangunan.

2. *Stakeholder Theory*

Teori stakeholder, yang diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984, menekankan pentingnya mempertimbangkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi atau proyek. Dalam konteks pembangunan infrastruktur desa, teori ini sangat relevan karena melibatkan

²⁰ Bappeda Buleleng. (2021). Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Diakses dari <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>, 6-8.

²¹ Pembangunan Berkelanjutan. (2021). [PDF]. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/23828/23476>, 10-13.

berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, LSM, dan sektor swasta. Penerapan teori stakeholder dalam pembangunan infrastruktur desa dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan.²² Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam suatu proyek atau organisasi. Dalam konteks pembangunan infrastruktur desa, stakeholder dapat dibagi menjadi dua kategori utama: stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah mereka yang secara langsung terpengaruh oleh proyek, seperti masyarakat desa dan pemerintah lokal. Sementara itu, stakeholder sekunder mencakup pihak-pihak yang memiliki kepentingan tidak langsung, seperti LSM dan akademisi.²³

Pembangunan infrastruktur yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, kebutuhan dan harapan mereka dapat diakomodasi. Hal ini berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.²⁴ Keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga menciptakan rasa memiliki yang lebih besar terhadap infrastruktur yang dibangun. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya, jalan yang lebih baik memudahkan distribusi produk pertanian ke pasar, meningkatkan pendapatan petani. Dengan melibatkan stakeholder dalam

²² Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing, 26.

²³ Bryson, J. M. (2004). What to Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21-53. doi:10.1080/14719030410001675722.

²⁴ Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing Development: Does Participation Work?* World Bank Publications.

proses ini, proyek dapat dirancang untuk memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi stakeholder dalam perencanaan infrastruktur dapat menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar. Teori stakeholder menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ketika masyarakat diberdayakan untuk terlibat dalam proyek infrastruktur, mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Hal ini meningkatkan rasa kepemilikan dan mendorong partisipasi aktif dalam pemeliharaan infrastruktur.²⁶ Pemberdayaan masyarakat juga berkontribusi pada pengembangan kapasitas lokal, yang penting untuk keberlanjutan proyek.

Keterlibatan berbagai stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur dapat meningkatkan keberlanjutan proyek tersebut. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan LSM, serta partisipasi masyarakat, proyek infrastruktur lebih mungkin untuk bertahan dalam jangka panjang.²⁷ Keberlanjutan ini penting untuk memastikan bahwa manfaat dari infrastruktur dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, potensi konflik sosial dapat diminimalkan. Teori stakeholder mendorong dialog dan komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat, sehingga mengurangi ketegangan dan meningkatkan Kerjasama.²⁸ Pengurangan konflik sosial ini penting untuk menciptakan

²⁵ World Bank. (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise. World Bank.

²⁶ Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster, 70.

²⁷ Rogers, P., & Blenkinship, S. (2017). *Sustainable Infrastructure: A Global Perspective*. Routledge, 50.

²⁸ Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing, 30.

lingkungan yang kondusif bagi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pemerintah dan LSM memiliki peran penting dalam menerapkan teori stakeholder dalam pembangunan infrastruktur desa. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat, sementara LSM dapat berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah.²⁹ Kolaborasi antara berbagai stakeholder ini dapat meningkatkan efektivitas proyek dan memastikan bahwa semua suara didengar. Pemerintah dan LSM memiliki peran penting dalam menerapkan teori stakeholder dalam pembangunan infrastruktur desa. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat, sementara LSM dapat berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah.³⁰ Kolaborasi antara berbagai stakeholder ini dapat meningkatkan efektivitas proyek dan memastikan bahwa semua suara didengar. Penerapan teori stakeholder dalam pembangunan infrastruktur desa memiliki implikasi penting untuk kebijakan. Kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat dan kolaborasi antara berbagai stakeholder dapat meningkatkan keberhasilan proyek infrastruktur. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan teori stakeholder dalam merancang dan melaksanakan proyek infrastruktur.³¹

²⁹ Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340-363. doi:10.1086/226550, 40.

³⁰ Kettunen, P. (2015). The Role of Stakeholders in the Development of Sustainable Infrastructure. *International Journal of Project Management*, 33(5), 1035-1045. doi:10.1016/j.ijproman.2014.12.002, 12.

³¹ Bryson, J. M. (2004). What to Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21-53. doi:10.1080/14719030410001675722, 5.

3. Infrastruktur Desa

a. Definisi Infrastruktur Desa

Infrastruktur adalah sarana dan prasarana fisik yang diperlukan untuk mendukung aktivitas masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.³² Infrastruktur meliputi jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, sistem irigasi, listrik, air bersih, telekomunikasi, dan fasilitas umum lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung kegiatan produktif.³³ Menurut Grigg, infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik sosial maupun ekonomi.³⁴ Sedangkan Desa, Menurut UU No.6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁵

Infrastruktur desa dapat didefinisikan sebagai sarana dan prasarana fisik dan sosial yang mendukung kegiatan masyarakat di desa. Menurut Robert J. Kodoatie (2005) dalam penelitian Novita Sari, dkk., pengertian infrastruktur adalah suatu sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi yang secara

³² Karin Zahra et al., "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Medan Tembung," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 3 (2024): 1857–1866.

³³ Amran Husen and Aisyah S Baranyanan, "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan, Infrastruktur Jalan Dan Infrastruktur Jembatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara," *Poros Ekonomi* 10, no. 1 (2021).

³⁴ Firdha Dienyah, "Kontribusi Infrastruktur Terhadap PDRB Provinsi Di Pulau Sumatra," *Universitas Bandar Lampung*, 2016, 18–38.

³⁵ Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, dimana sistem ini biasa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.³⁶

Teori pembangunan infrastruktur desa menekankan pentingnya investasi pemerintah dalam menyediakan fasilitas dasar untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur yang efektif memerlukan perencanaan yang baik, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa.³⁷

Secara keseluruhan, Infrastruktur desa adalah sistem sarana dan prasarana fisik maupun sosial yang dirancang untuk mendukung aktivitas masyarakat desa, mencakup transportasi, pengairan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Infrastruktur desa tidak hanya berfungsi sebagai penunjang kegiatan sosial dan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan, infrastruktur desa memerlukan perencanaan yang matang, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang baik agar dapat memberikan manfaat optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Komponen Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur di desa tidak hanya berfokus pada fasilitas fisik seperti jalan dan bangunan, tetapi juga mencakup berbagai komponen lain

³⁶ Novita Sari, Jauhar Arifin, and Heni Suparti, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong," *JAPB* 3, no. 2 (2020): 496.

³⁷ Budiono, "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Perekonomian Desa," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5, no. 2 (2018): 45–58.

yang mendukung kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa komponen infrastruktur yang sangat penting bagi pengembangan desa:

- 1) Fasilitas Transportasi: Jalan dan jembatan yang baik memungkinkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang, yang sangat penting untuk pengembangan ekonomi lokal.
- 2) Sistem Sanitasi dan Air Bersih: Ketersediaan air bersih dan sistem pembuangan limbah yang baik berkontribusi pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup.
- 3) Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan: Infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memadai meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan penting, yang berpengaruh pada pengembangan sumber daya manusia.
- 4) Energi dan Komunikasi: Penyediaan listrik dan akses terhadap teknologi komunikasi mendukung kegiatan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan produktivitas masyarakat.

c. Peran Infrastruktur dalam Pembangunan Ekonomi

Pembangunan infrastruktur desa berfungsi sebagai pendorong utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang baik dapat:

- 1) Meningkatkan Aksesibilitas: Memudahkan masyarakat untuk mengakses pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan, sehingga meningkatkan potensi ekonomi.

- 2) Mendorong Partisipasi Ekonomi: Infrastruktur yang baik menciptakan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, dan industri kecil.
- 3) Meningkatkan Kualitas Hidup: Dengan infrastruktur yang memadai, masyarakat dapat menikmati layanan dasar yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

4. Manajemen Pembangunan

a. Prinsip Dasar Manajemen Pembangunan

Manajemen pembangunan merupakan disiplin yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan (implementasi), *monitoring* dan evaluasi, dan pengawasan program-program pembangunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip dasar manajemen pembangunan mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, perencanaan (*planning*) merupakan langkah awal yang melibatkan perumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masyarakat, sumber daya yang tersedia, serta kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Proses ini juga melibatkan analisis situasi yang mendalam dan perumusan strategi yang efektif. Kedua, pengorganisasian (*organizing*) adalah tahap berikutnya yang mengorganisasi sumber daya manusia, material, dan keuangan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun, mencakup pembentukan struktur organisasi, penentuan peran dan tanggung jawab, serta alokasi sumber daya secara efisien. Ketiga, pelaksanaan (*implementing*) berfokus pada penerapan rencana sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, dengan koordinasi yang baik antar pihak terkait, pengawasan

penggunaan sumber daya, dan fleksibilitas untuk penyesuaian strategi jika diperlukan. Keempat, pengawasan dan evaluasi (*monitoring and evaluation*) melibatkan pemantauan pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana dan evaluasi untuk menilai hasil serta dampak pembangunan, yang kemudian menjadi dasar untuk perbaikan di masa mendatang. Selain itu, partisipasi masyarakat (*community participation*) adalah elemen penting yang memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan rasa kepemilikan, dan memperkuat keberlanjutan hasil pembangunan.³⁸

b. Fungsi dan Tantangan Manajemen Pembangunan

Manajemen pembangunan memiliki fungsi utama untuk mengatur berbagai aspek yang terkait dengan proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Perencanaan dalam manajemen pembangunan berfungsi untuk merumuskan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien. Pengorganisasian kemudian berperan penting dalam mengkoordinasikan sumber daya manusia, material, dan finansial agar dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan pembangunan. Pada tahap pelaksanaan, fungsi manajemen berfokus pada implementasi rencana yang telah disusun dengan menggerakkan semua elemen yang terlibat, serta menjaga fleksibilitas agar dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi di lapangan. Pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana, serta untuk menilai dampak dan keberhasilan dari

³⁸ Erika Revida, "Konsep Dasar Manajemen Pembangunan," *Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi Dan Inovasi* 1, no. 1 (2021): 10–15.

program yang dilaksanakan. Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat juga menjadi fungsi krusial dalam setiap tahapan pembangunan, karena hal ini mempengaruhi kelancaran dan kesuksesan proyek secara keseluruhan.

Namun, manajemen pembangunan tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk dana, tenaga kerja, maupun material, sering menjadi hambatan utama yang harus diatasi dengan manajemen yang tepat. Selain itu, kompleksitas sosial dan budaya masyarakat yang beragam dapat menimbulkan kesulitan dalam implementasi, memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif untuk memastikan partisipasi dan penerimaan dari seluruh lapisan masyarakat. Perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah juga seringkali mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan. Terakhir, memastikan partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap pembangunan sering kali sulit, memerlukan strategi komunikasi yang efektif dan pendekatan yang mendorong keterlibatan komunitas secara berkelanjutan.³⁹

c. Peran Manajemen Pembangunan

Peran manajemen pembangunan sangat vital dalam mengarahkan, mengelola, dan mengoptimalkan berbagai proses yang terkait dengan pembangunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Manajemen pembangunan berperan sebagai penggerak utama dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program

³⁹ Jeane Mantiri, *Manajemen Pembangunan Daerah, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2014.

pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Salah satu peran utama manajemen pembangunan adalah sebagai pengarah strategis yang memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, manajemen pembangunan bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan, merumuskan rencana yang realistis dan terukur, serta menetapkan sasaran yang dapat dicapai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Selain itu, manajemen pembangunan juga berperan sebagai koordinator yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan. Ini termasuk mengorganisasikan sumber daya manusia, material, dan finansial, serta mengkoordinasikan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam konteks ini, manajemen pembangunan memastikan bahwa semua pihak bekerja secara sinergis untuk memaksimalkan hasil dan mengurangi potensi konflik atau duplikasi usaha.

Peran lainnya adalah sebagai pengawas dan evaluator, di mana manajemen pembangunan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan proyek pembangunan dan melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, serta untuk mendeteksi dan mengatasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari proyek pembangunan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk perbaikan di masa mendatang.

Manajemen pembangunan juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan memfasilitasi keterlibatan masyarakat, manajemen pembangunan dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta meningkatkan rasa kepemilikan dan dukungan terhadap hasil pembangunan.

Terakhir, manajemen pembangunan berperan sebagai penjaga keberlanjutan, yang memastikan bahwa hasil-hasil pembangunan tidak hanya bermanfaat untuk jangka pendek tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang. Ini melibatkan perhatian terhadap dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari proyek pembangunan, serta penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan.⁴⁰

5. Dampak Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat desa baik langsung maupun tidak langsung. Pembangunan infrastruktur secara langsung meningkatkan output ekonomi. Misalnya, pembangunan jalan dan jembatan mempermudah akses ke pasar, yang memungkinkan distribusi barang dan jasa yang lebih efisien. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Infrastruktur juga mendorong aktivitas ekonomi secara tidak langsung. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, sektor swasta lebih terdorong untuk berinvestasi, yang meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Selain itu, infrastruktur

⁴⁰ Jeane Mantiri, *Manajemen Pembangunan Daerah, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 952., 2014

yang baik dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi.⁴¹

Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, membuka akses ke pasar yang lebih luas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁴² Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, baik selama tahap konstruksi maupun setelah infrastruktur tersebut beroperasi. Menurut teori ekonomi pembangunan, investasi dalam infrastruktur adalah salah satu cara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Infrastruktur yang memadai dapat mengurangi biaya transportasi, meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan produktivitas pertanian dan industri lokal.⁴³

Secara keseluruhan, dampak pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian masyarakat menekankan bahwa infrastruktur yang baik adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui dampak langsung dan tidak langsung, pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi, meningkatkan akses terhadap layanan, dan mendukung pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

⁴¹ Syarifah Ainun Hasibuan, "Kajian Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Pekanbaru" (2020), 1-9.

⁴² Budiono, "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Perekonomian Desa," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5, no. 2 (2018): 48-56.

⁴³ M M Asep Deni et al., *Pengantar Ekonomi Pembangunan* (CV Rey Media Grafika, 2024), 50-59.

6. Dampak Sosial

Dampak Sosial adalah suatu yang terjadi didalam lingkup masyarakat sekitar yang tentunya akan memberikan perubahan di dalam lingkup masyarakat tersebut. Teori perubahan sosial sebagai awal mula munculnya teori tentang dampak sosial dan ekonomi. Perubahan sosial merupakan gambaran umum dari perubahan-perubahan yang terjadi di luar perencanaan maupun kesengajaan. Selain itu perubahan sosial juga dipandang sebagai sebuah cerminan perubahan dari karakter masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. perubahan sosial mencerminkan berbagai ketidakpastian yang mau tak mau diperkuat oleh perubahan sosial yang terjadi dan masalah-masalah yang menyertai berbagai perubahan dan pergeseran yang terjadi pada institusi dan pola-pola kehidupan sehari-hari yang sudah biasa dikenal oleh masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat berdasarkan pada tujuh asumsi, yakni:⁴⁴

- a. Masyarakat harus dianalisis sebagai suatu kesatuan yang utuh terdiri atas berbagai bagian yang saling berinteraksi.
- b. Hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik.
- c. Sistem sosial yang ada bersifat dinamis dimana penyesuaian tidak perlu banyak mengubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh.
- d. Intergrasi yang sempurna pada masyarakat tidak pernah ada oleh karena itu masyarakat akan senantiasa akan timbul ketegangan-ketegangan dan

⁴⁴ Dr Ib Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial* (Kencana, 2012), 43-44.

penyimpangan-penyimpangan. Namun dengan demikian ketegangan dan penyimpang ini akan dinetralisir lewat proses kelembagaan.

- e. Perubahan akan berjalan secara perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi.
- f. Perubahan merupakan hasil penyesuaian dari luar tumbuh karena ada diferensi dan inovasi.
- g. Sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama.

7. Dampak Ekonomi

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Secara sederhana dampak adalah sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri baik dampak positif maupun negatif. Perubahan ekonomi merupakan proses berubahnya sistem yang terjadi di masyarakat yang meliputi perubahan kehidupan perekonomian masyarakat tersebut. Hal tersebut meliputi perubahan mata pencaharian, perubahan penghasilan, bahkan sampai peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik lagi.

Kondisi masyarakat pada umumnya dicirikan oleh jumlah penduduk miskin yang banyak, alternatif lapangan kerja yang terbatas, dan tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa

faktor yang menjadi penghambat. Adapun faktor-faktor penghambat yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁵

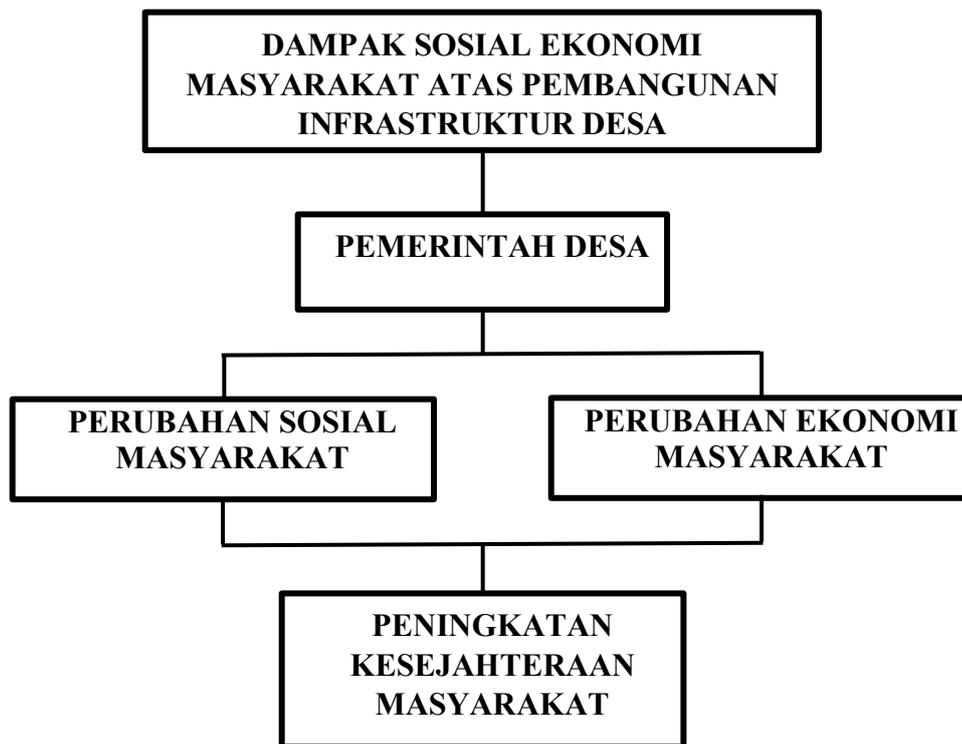
- a. Tingkat penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani yang rendah.
- b. Ketergantungan masyarakat pada kegiatan pertanian yang tinggi.
- c. Keterkaitan kegiatan ekonomi antara sektor pertanian, industri pengolahan dan jasa penunjang yang lemah.
- d. Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan yang lemah.
- e. Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang rendah.
- f. Akses masyarakat pedesaan pada sumber permodalan dan sumber daya ekonomi produktif yang rendah.
- g. Pelayanan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat pedesaan masih terbatas dan belum merata.

Pemanfaatan potensi daerah secara optimal baik berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Apabila masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan baik, maka perubahan ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat pun akan baik pula. Hal ini tentu didukung dengan adanya infrastruktur yang menunjang mobilitas khususnya masyarakat desa untuk memasarkan hasil pertaniannya tentunya memberikan manfaat seperti meningkatnya hasil pertanian para petani

⁴⁵ Ardiyanto Maksimilianus Gai, Agung Witjaksono, and Riska Rahma Maulida, "Perencanaan Dan Pengembangan Desa" (Dream Litera Buana, 2020), 67.

serta sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat yang nantinya akan berpengaruh pula pada perubahan sosial lainnya seperti tingkat Pendidikan.⁴⁶

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan kerangka pikir yang menghubungkan antara pembangunan infrastruktur desa dampak pada sosial ekonomi. Kerangka ini mencakup tiga komponen utama, yaitu pembangunan infrastruktur desa, sosial, dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur desa mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan di Desa Ponggi Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya, dampak sosial ekonomi masyarakat mencakup indikator ekonomi yang mencakup tingkat

⁴⁶ M M Asep Deni et al., *Pengantar Ekonomi Pembangunan* (CV Rey Media Grafika, 2024), 75.

pendapatan, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Terakhir, rekomendasi kebijakan berupa saran untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.⁴⁷ Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan sebagainya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tepat sebagaimana adanya.⁴⁸

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Manfaat lainnya agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang akan diperoleh dilapangan. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, menganalisis dampak sosial ekonomi pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara dan faktor penghambat dalam pembangunan infastruktur.

⁴⁷ Arikunto Suharsmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020.) 135.

⁴⁸ Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1991, 6.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah suatu cara untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah pembahasan judul proposal ini perlu diperjelas beberapa istilah sebagai berikut:

1. Sosial Ekonomi

Dampak sosial merupakan suatu akibat yang terjadi pada masyarakat yang mempengaruhi hubungan interaksi yang meliputi berbagai aspek kehidupan yang dikarenakan adanya suatu hal. Dampak ekonomi adalah akibat ekonomi yang ditimbulkan dari setiap keputusan yang diambil oleh seorang atau kelompok pemerintah yang mendatangkan akibat positif atau negatif

2. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu perubahan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan melalui program kerja yang telah di atur oleh segelintir orang yang tergabung didalam suatu sistem pemerintahan, demi terwujudnya ketentraan masyarakat dari segi sosial, ekonomi dan budaya. Pembangunan ialah cara multidimensional yang mencakup pergantian bentuk sosial, pergantian dalam tindakan hidup warga serta pergantian dalam kelembagaan (institusi) nasional.⁴⁹ Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung secara terus-menerus menuju ke arah perkembangan.

⁴⁹ Jeane Mantiri, *Manajemen Pembangunan Daerah, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 59., 2014

3. Infrastruktur

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kumpulan fasilitas fisik dan sistem yang diperlukan untuk mendukung fungsi dasar masyarakat dan ekonomi. Menurut World Bank (2016), infrastruktur mencakup berbagai elemen, termasuk transportasi (jalan, jembatan, dan pelabuhan), utilitas (air bersih, listrik, dan sanitasi), serta infrastruktur sosial (sekolah dan rumah sakit). Dalam konteks desa, infrastruktur berfungsi sebagai fondasi untuk pengembangan ekonomi dan sosial, yang memungkinkan aksesibilitas, mobilitas, dan konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat.

D. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Ponggi Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara, yang terdiri dari 7 orang dengan latar belakang sosial dan ekonomi beragam, termasuk petani dan pegawai negeri sipil.⁵⁰ Penelitian ini bertujuan mengkaji persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa serta dampaknya pada perekonomian lokal. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam memilih informan, guna memperoleh informasi yang mendalam dan representatif dari mereka yang paling terlibat dan terdampak oleh pembangunan tersebut.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yakni:

⁵⁰ “Kantor Kepala Desa Ponggi Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara,” 2024.

Tab 3.1 Informan Penelitian

Informan Utama		
Mustamin	Kepala Desa	SMA
Informan Pendukung		
Tajuddin, S.Pd	Sekretaris Desa	Sarjana
Marta	Kepala Dusun 1	SMA
Mirwan	Kaur Perencanaan	SMA
Ibnu Basnur	Kasi Pemerintahan	SMA
Informan Tambahan		
Rustam Jangtki	Tokoh Masyarakat	SMA
Badhar	Ketua LMPD	SMA

Sumber : Data dokumen Kantor Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara

Jumlah informan dipilih dengan mempertimbangkan keberagaman perspektif yang ada di Desa Ponggi, guna memastikan bahwa pandangan yang berbeda-beda mengenai pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat dapat diakomodasi dengan baik.

E. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan yang berlokasi di Desa Ponggi Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada domisili peneliti dimana peneliti melalui pengamatan di lokasi, adanya program pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung di desa tersebut. Batas Kecamatan Porehu dengan Kecamatan Batuputih berada di Desa To'bela dan batas Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Provinsi Sulawesi Selatan berada pada Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan panduan diskusi kelompok yang dirancang untuk mengarahkan pengumpulan data. Selain itu, catatan lapangan dan rekaman wawancara digunakan untuk mendokumentasikan data yang diperoleh selama penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

1. Wawancara Mendalam: Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali persepsi, pandangan, dan pengalaman masyarakat terkait pembangunan infrastruktur. Pertanyaan wawancara dirancang untuk mengeksplorasi pandangan mereka tentang manfaat, tantangan, dan dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur.
2. Observasi Partisipatif: Penulis terlibat dalam kegiatan sehari-hari masyarakat untuk memahami konteks sosial dan ekonomi serta bagaimana infrastruktur yang dibangun digunakan dan berdampak pada kehidupan mereka.
3. Dokumentasi: Pengumpulan data sekunder dari dokumen- dokumen resmi, laporan pembangunan, dan data statistik desa untuk mendukung analisis.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Validitas data penelitian harus divalidasi dengan menggunakan beberapa kriteria untuk mendapatkan tingkat kepercayaan seberapa besar temuan penelitian tersebut. Ada beberapa cara untuk memvalidasi data dalam sebuah penelitian, antara lain:

1. *Credibility*

Credibility atau kredibilitas adalah tingkat kepercayaan atau keandalan suatu informasi, data, atau sumber. Ini menilai sejauh mana informasi tersebut dapat dipercaya oleh orang lain.

2. *Transferability*

Transferability atau transferabilitas mengacu pada kemampuan suatu studi atau temuan untuk diterapkan atau digeneralisasi ke konteks atau situasi yang berbeda dari yang aslinya. Ini mengukur seberapa relevan dan berlaku secara umum hasil dari suatu penelitian atau analisis.

3. *Dependability*

Dependability atau dependabilitas adalah istilah dalam penelitian kualitatif yang merujuk pada konsistensi dan keandalan suatu studi atau temuan dalam konteks waktu yang berbeda atau diantara peneliti yang berbeda. Ini mengukur sejauh mana hasil penelitian dapat diandalkan dan diperhitungkan. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Objectivity*

Objectivity atau obyektivitas adalah keadaan di mana penilaian, analisis, atau interpretasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau sudut pandang subjektif. Ini melibatkan pendekatan yang netral dan tidak memihak dalam memeriksa atau menafsirkan data atau informasi.

I. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Transkripsi Data:** Semua wawancara dan diskusi kelompok ditranskripsikan untuk memudahkan analisis.
2. **Identifikasi Tema:** Mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan persepsi masyarakat dan dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur.
3. **Analisis Tematik:** Menganalisis tema-tema yang telah diidentifikasi untuk menemukan pola-pola dan hubungan antara persepsi masyarakat dan dampak ekonomi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa

Desa Ponggi terletak di Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa ponggi ini awalnya bergabung dengan Desa Porehu yang saat ini sudah menjadi wilayah kecamatan. Pada tahun 1970 terjadi pemekaran pada wilayah Desa Porehu yang dimekarkan menjadi 8 Desa yaitu, Desa Tinuna, Desa Larui, Desa Tanggaruru, Desa Ponggi, Desa Bangsala, Desa Porehu, Desa To“belan dan Desa Sarambu. Desa Ponggi pertama kali dipimpin oleh Bapak Hj Rahmat pada tahun 1970, yang pada saat itu belum ada sistem pemilihan Kepala Desa tetapi ditunjuk langsung dari Bapak Camat Porehu yaitu Bapak Parandan.⁵¹

Desa Ponggi memiliki luas wilayah 80,54 km dengan ketinggian 600 m dari permukaan laut, relief permukaan daratan Desa Ponggi ada yang berupa daratan yang merata namun, sebagian besar wilayahnya berupa bukit berbatu, pegunungan, dan lembah yang terjal. Dari luas wilayah tersebut Desa Ponggi memiliki 1 sungai (sungai tananda) meskipun sungai tersebut terbilang kecil tapi cukup dijadikan sebagai sumber kebutuhan air rumah tangga. Wilayah Desa Ponggi yang terletak di daerah pegunungan maka iklim wilayah Desa Ponggi cukup dingin karena konsentrasi udara basah yang sedikit banyak di daerah ini. Desa ponggi memiliki 5 dusun yakni : Dusun Lokko, Dusun Besang, Dusun Pembangunan, Dusun Supril, Dusun Melati. Jarak tempu Desa Ponggi menuju

⁵¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara, "Statistik Daerah Kabupaten Kolaka Utara 2022," BPS Kabupaten Kolaka Utara, 2022.

Kecamatan Porehu 2 km. Sedangkan jarak tempu Desa Ponggi menuju Kabupaten atau Ibu Kota 100 km. batas-batas wilayah Desa Ponggi bagian utara berbatasan dengan Desa Bangsalah, sebelah selatan berbatasan dengan Desa To’bela, sebelah barat berbatasan dengan Desa Porehu, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sarambuh.⁵²

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Porehu

Des	Luas	Persentase
To’bela	109,2	21,11
Tanggaruru	10,05	1,81
Porehu	64,20	11,82
Ponggi	80,54	14,83
Larui	140,09	25,80
Bangsala	38,90	7,16
Sarambu	84,90	15,64
Tinuna	15,07	2,78
Jumlah	542,96	100,00

Sumber : Data dokumen Kantor Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara

Penduduk Desa Ponggi pada bulan 12 tahun 2024 menunjukkan jumlah keseluruhan masyarakat Desa Ponggi adalah 574 jiwa yang terdiri dari pria 297 dan wanita 277 dengan jumlah kartu keluarga (KK) 149.

⁵² Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara, "Statistik Daerah Kabupaten Kolaka Utara 2024," BPS Kabupaten Kolaka Utara, 2024.

Tabel 4.2 Data Kependudukan Desa Ponggi

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
Pria	291 Jiwa
Perempuan	279 Jiwa
Jumlah	570

Sumber : Data dokumen Kantor Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara

1. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Ponggi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja sebagai seorang petani, pegawai sipil, pengusaha, dan karyawan perusahaan. Yang dimana petani terdiri dari 526 orang, pegawai sipil 20 orang, pedagang 5, dan karyawan 9. Masyarakat Desa Ponggi hampir 90% bekerja sebagai petani (nilam, jagung, lada, kakao, dan sawah) dan dikarenakan letak geografis Desa Ponggi yang berada di pegunungan atau dapat dikatakan wilayah pelosok yang jauh dari ibu kota mengakibatkan akses transportasi terbatas dan memberikan dampak kepada petani yaitu hasil dari lahan pertanian terjual dengan harga yang murah dikarenakan jalan menuju Desa Ponggi terbilang cukup sulit.

Tabel 4.3 Data Profesi Warga Desa Ponggi

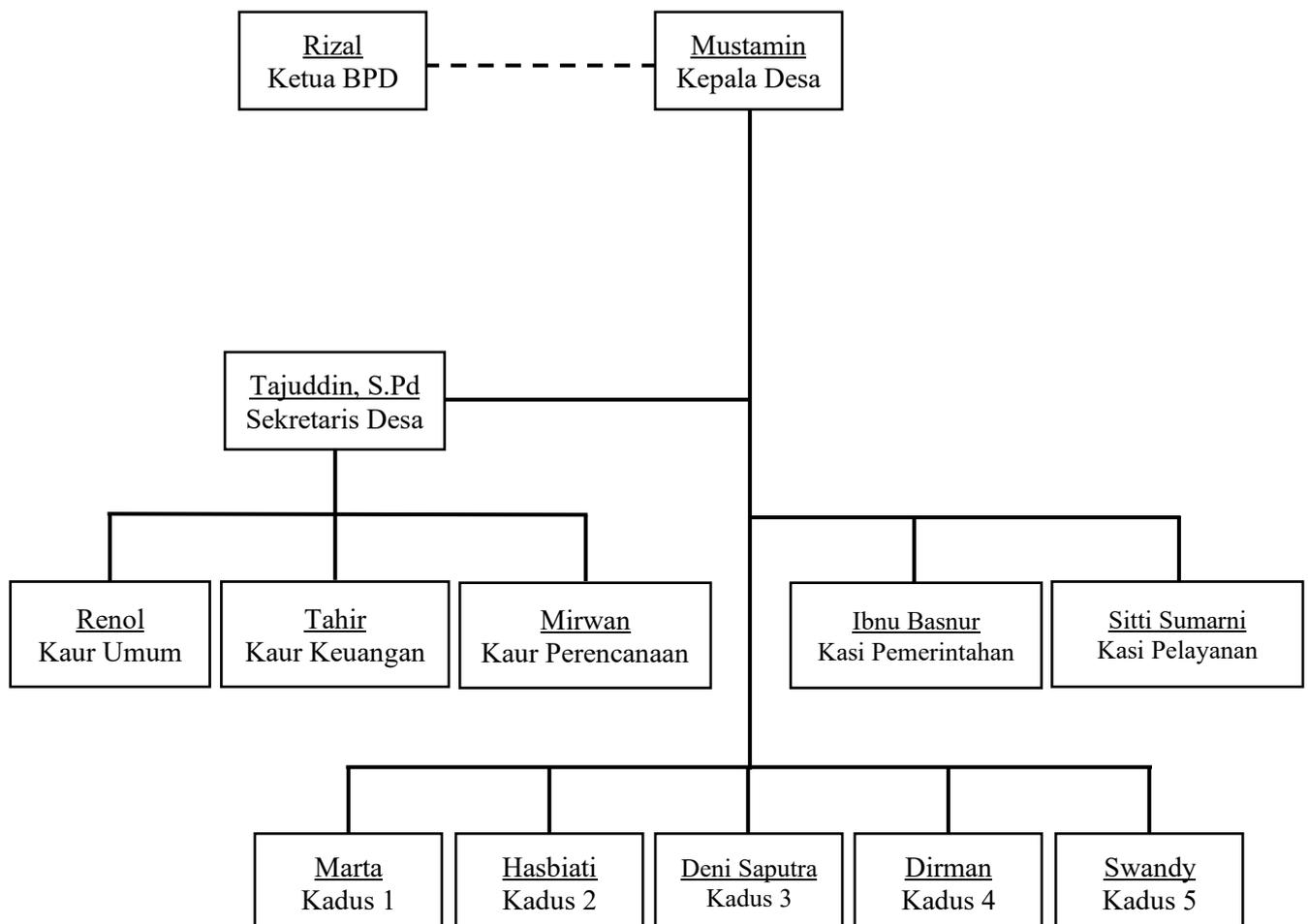
Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
Aparatur Sipil Negara	20
Petani	526
Pedagang	9
Karyawan	15
Jumlah	570

Sumber : Data dokumen Kantor Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara

2. Kondisi Pemerintahan Desa Ponggi

Desa Ponggi dibagi menjadi 5 dusun yaitu: Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Dusun 4, Dusun 5, yang dimana setiap dusun memiliki wilayah pertanian dan perkebunan, Sementara pusat Desa berada di Dusun Pembangunan, yang disetiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun (Kadus). Struktur organisasi Desa Ponggi menganut sistem kelembagaan pemerintah Desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Desa Ponggi



Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Desa

Sarana dan Prasarana	Volume
Masjid	1
Gereja	0
TK	1
SD	1
TPU	1
BUMDES	1
Posyandu	1
Balai Desa	1

Sumber : Data dokumen Kantor Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sementara itu sebagai penuntun penyelenggaraan Pembangunan Desa disusun panduan penyelenggaraan pembangunan desa yang dijabarkan dalam Peraturan Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa (*goods and service*). Salah satu instrumen penting

dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur.

Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam kehidupan masyarakat di Desa Ponggi. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar.

Pemerintah Desa Ponggi sampai saat ini terus memaksimalkan pembangunannya, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Ponggi adalah di bidang infrastruktur terutama perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Hal tersebut berdasarkan keterangan Kepala Desa Ponggi Bapak Mustamin :

“Untuk pembangunan, kalau dari infrastruktur fisik seperti gedung itu cukup baik, namun ada beberapa yang rusak dan tidak memadai seperti TK dan tidak ada gedung kesehatan sehingga masyarakat kalau sakit harus ke puskesmas di Desa Ponggi. Yang menjadi perhatian khusus bagi kami di tahun anggaran 2023 adalah pembangunan jalan, irigasi, dan jembatan yang merupakan jalur transportasi masyarakat sehari-hari untuk menjalankan aktifitasnya.”⁵³

Berdasarkan wawancara di atas fokus pembangunan di tahun 2023 Desa Ponggi adalah pembangunan di bidang infrastruktur yakni jalan, irigasi, dan jembatan. Kebutuhan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur jalan merupakan masalah utama masyarakat di Desa Ponggi seperti di ungkapkan Bapak Rustam Jangtki yang merupakan tokoh masyarakat setempat:

⁵³ Mustamin, Kepala Desa, "wawancara" tanggal 13 Oktober 2024

“Kalau pembangunan yang paling di butuhkan di Kampung ini itu pasti jalan, karena sebagian besar jalan disinikan sangat rusak, juga masih banyak jalan yang berupa tanah, itu menyulitkan kami untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kadang motor yang kami gunakan untuk mengangkut padi terjebak di jalanan tanah yang lubang.”⁵⁴

Berdasarkan observasi penulis, dari keseluruhan total jalan yang ada di Desa Ponggi yakni 26,5 Km, kondisi jalan poros yang seluruhnya telah dibeton mengalami kerusakan parah, sementara jalan desa 50% berupa pengerasan jalan, 30% berupa jalan beton dengan lebar 2,5m dan 20% masih berupa tanah. Kondisi ini sering kali membuat masyarakat dalam kesulitan, jalan yang masih berupa tanah dan bebatuan sering kali membuat masyarakat pengendara roda dua terjatuh dan kadang membuat kendaraannya terjebak dalam lumpur, belum lagi kondisi jalan yang hanya memiliki lebar 2,5M membuat kendaraan roda empat sulit melewatinya karena jalan yang sempit ini membuat mobil tidak dapat bertemu.

Desa Ponggi memiliki beberapa program pada bidang pembangunan infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan pembangunan infrastruktur Ponggi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang bermutu, mudah dan murah dalam rangka perbaikan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu (RTM), sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur antara dusun serta jalan pendukung roda perekonomian masyarakat yang meliputi pembangunan jalan, jembatan dan drainase serta sarana prasarana lainnya terutama pada wilayah yang berpotensi menggerakkan perekonomian Desa Ponggi.

⁵⁴ Rustam Jangtki, Tokoh Masyarakat, “wawancara” tanggal 13 Oktober 2024

- b. Perbaiki jalan pada sentra-sentra pengembangan pertanian, perkebunan dan usaha produktif lainnya.
- c. Perbaiki serta pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi.
- d. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi (irigasi Desa Ponggi).

Program-program tersebut lebih lanjut di jelaskan oleh Kepala Desa Ponggi

“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk perbaikan kualitas pembangunan khususnya di bidang infrastruktur dengan menjalankan program-program pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, misalnya saat ini kami fokuskan pada kebutuhan utama masyarakat yakni jalan.”⁵⁵

Dengan adanya pembangunan prasaranan jalan dan jembatan, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertaniannya agar lebih mudah dll. Hal tersebut senada dengan pernyataan Bapak Tajuddin selaku Sekretaris Desa Ponggi:

“Peningkatan infrastruktur pedesaan merupakan sarana yang paling dibutuhkan masyarakat dalam rangka mempermudah akses, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.”⁵⁶

Dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan Desa. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dapat berfungsi ganda,

⁵⁵ Mustamin, Kepala Desa, "wawancara" tanggal 13 Oktober 2024

⁵⁶ Tajuddin, Sekertaris Desa, "wawancara" tanggal 13 Oktober 2024

yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.

Namun keterlibatan partisipasi masyarakat di Desa Ponggi masih perlu ditingkatkan, hal itu berdasar pada pernyataan Kepala Desa Ponggi':

“Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di sini masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas mulai dari perencanaan sampai evaluasi”⁵⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pasal 78, Pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan atau Pengawasan. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

2. Dampak Sosial Ekonomi pada Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara

Dampak sosial ekonomi pembangunan merupakan suatu proses yang terjadi di masyarakat yang tentunya dilaksanakan oleh pemerintah setempat, sehingga melalui pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentu memikirkan dampak yang dari segi positif tentu hal yang dapat di pergunakan masyarakat dari segi fasilitas. Pada dasarnya masyarakat Ponggi ialah suatu masyarakat yang dalam kesehariannya berprofesi sebagai petani sehingga untuk

⁵⁷ Mustamin, Kepala Desa, "wawancara" tanggal 13 Oktober 2024.

menghidupi keluarganya tentu pendapatannya bersumber dari hasil yang di peroleh dari lahan pertanian miliknya. Adapun wawancara yang dilakukan Mustamin selaku Kepala Desa Ponggi mengemukakan bahwa:

“Dampak ekonomi: infrastruktur utamanya jalan sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi warga karena sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani/pekebun. Tentunya perlu akses jalan yang baik untuk mengangkut hasil panen tersebut. Adapun dampak sosial infrastruktur sangat berpengaruh terhadap pendidikan dan kesehatan karena akses jalan yang baik mendukung kelancaran aktivitas masyarakat”.⁵⁸

Namun, di sisi lain dari segi negatif dari dampak pembangunan yang dilakukan pemerintah tentu memberikan ruang gerak masyarakat setempat yang dari skala umum tentunya sangat menghawatirkan dari segi pemetaan ruang yang terdapat pada lokasi tempat tinggal masyarakat, seperti halnya wawancara Ibu Marta, selaku Kepala Dusun 1 Desa Ponggi mengemukakan bahwa:

“Dalam pembangunan infrastruktur yang di bangun oleh pemerintah semua belum massif secara menyeluruh, sehingga dengan hal tersebut seperti jalan, drainase, tentu akan memberikan kelemahan dari segi pendapatan ekonomi bagi para petani yang berada di Desa tersebut”.⁵⁹

Pada prinsipnya pembangunan ekonomi infrastruktur yang terdapat di dalam suatu daerah akan memberikan dampak positif ketika pihak pemerintah setempat peduli dan terus mengontrol terkait kenyamanan bagi masyarakat dalam menikmati fasilitas infrastruktur yang telah pemerintah berikan kepada masyarakat. Sebaliknya ketika pihak pemerintah tidak peduli dengan pembangunan yang sudah di bangun lalu pengontrolan untuk pembenahan dari infrastruktur tersebut tidak ada sama sekali, maka tentu hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat dari segi pendapatan ekonomi.

⁵⁸ Mustamin, Kepala Desa, “wawancara” tanggal 13 Oktober 2024.

⁵⁹ Marta, Kepala Dusun 1, “wawancara” tanggal 13 Oktober 2024.

Demikian halnya yang di kemukakan oleh Ibnu Basnur selaku kepala seksi pemerintahan terkait dampak pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara. Di dalam pemaparannya menjelaskan bahwa:

“Kondisi pembangunan infrastruktur di desa tersebut memang belum sepenuhnya massif sehingga berangkat dari hal tersebut tentu dari segi pendapatan ekonomi masyarakat Desa Ponggi tentu sangatlah berpengaruh sehingga selaku pihak pemerintah akan tetap terus berusaha agar dapat mempercepat terealisasinya semua pembangunan infrastruktur yang terdapat di Desa tersebut sehingga masyarakat dapat hidup tentram dari segi kenyamanan, sosial, dan tentu pendapatan dari segi ekonomi masyarakat Desa Ponggi”.⁶⁰

Dilanjutkan dengan wawancara Mirwan. Selaku Kaur Perencanaan & Pembangunan desa mengemukakan bahwa:

“Dalam tahapan proses pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan yaitu jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan. Karena ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tanpa jalan yang memadai tentu dapat menghambat kelancaran aktivitas, baik dibidang kesehatan maupun pendidikan”.⁶¹

Dampak sosial ekonomi masyarakat tentu dapat berpengaruh dari segi pembangunan infrastruktur yang telah di bangun oleh pemerintah setempat, di karenakan hal tersebut memberikan potensi penurunan pendapatan ekonomi masyarakat. Di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara pembangunan infrastruktur semuanya belum massif secara menyeluruh, akan tetapi dari segi pembangunan infrastruktur yang urgent seperti jalan, puskesmas, dan posyandu, sudah terealisasi sehingga kemudian dengan adanya beberapa pembangunan infrastruktur yang urgent tersebut tentu dapat memberikan kesenangan bagi masyarakat dan pendapatan ekonomi kelas masyarakat sosial dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya jalan yang telah di bangun oleh

⁶⁰ Ibnu Basnur, Kepala Seksi Pemerintahan, "wawancara" tanggal 13 Oktober 2024

⁶¹ Mirwan, Kaur Perencanaan & Pembangunan, "wawancara" tanggal 13 Oktober 2024

pihak pemerintah setempat, tentu hal tersebut dapat mempermudah para petani untuk mengangkut hasil-hasil bumi yang telah didapatkan untuk di jual di perkotaan yang tidak jauh dari desa tersebut. Demikian halnya dengan pemabangunan puskesmas yang berada di desa tersebut sangat memberikan kenyamanan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga ketika terdapat suatu masyarakat yang ingin memeriksa kesehatannya tentu tidak perlu lagi untuk menempuh jalur yang cukup jauh dari dusun ke desa. Hal ini tentu memudahkan bagi masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut. Wawancara Rustam, selaku tokoh masyarakat mengemukakan bahwa:

“Tahapan proses pembangunan di desa ini tentu semua tidak terbangun secara massif sesuai harapan kami sebagai masyarakat, tetapi masyarakat merasa senang karena dengan pembangunan yang urgent bagi masyarakat itu sudah terbangun seperti jalan, posyandu, dan puskesmas. Hal inilah yang kemudian memberikan ketentraman bagi masyarakat karena dengan adanya beberapa pembangunan yang sudah dapat di gunakan, tentu pendapatan dari segi ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan lancar”.⁶²

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terdapat di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, tentu semuanya tidak dapat terealisasi secara menyeluruh, tetapi itu bukan menjadi kekhawatiran dan keresahan bagi masyarakat setempat, di karenakan pembangunan yang sangat mendasar yang di perlukan masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Dalam tahapan proses pembangunan infrastruktur tentu dapat memberikan dampak sosial ekonomi masyarakat, sehingga wajar saja terjadi pro-kontra antara pihak aparat pemerintah dengan masyarakat setempat, karena dengan adanya pembangunan infrastruktur yang di laksanakan oleh pemerintah akan menentukan

⁶² Rustam Jangtki, Tokoh Masyarakat, “wawancara” tanggal 13 Oktober 2024

nasib bagi masyarakat setempat untuk jangka waktu yang sangat panjang. Di Desa Ponggi pembangunan infrastruktur yang sangat mendasar telah terealisasi, dan masyarakat setempat sudah dapat merasakan kenyamanan dan ketentraman dengan terealisasinya proses pembangunan infrastruktur tersebut. Adapun pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak sosial ekonomi masyarakat menjadi tentram dan nyaman yang terdapat di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai berikut :

1. Rabat Jalan

Pembangunan rabat jalan di Desa Ponggi merupakan infrastruktur yang sangat mendasar dan harus terealisasi di suatu daerah tersebut, Dengan adanya jalan yang memadai, masyarakat, terutama para petani, dapat mengangkut hasil pertanian mereka dengan lebih mudah dan cepat menuju pasar. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, tetapi juga memperlancar distribusi barang. Selain itu, jalan yang baik akan mengurangi waktu tempuh, yang sebelumnya terhambat oleh kondisi jalan yang rusak dan sulit dilalui. Pembangunan jalan ini juga berperan penting dalam menghubungkan desa dengan pusat-pusat ekonomi lainnya, yang pada gilirannya akan mengurangi kesenjangan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Keberadaan jalan yang baik akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga serta meningkatkan interaksi sosial antara masyarakat pedesaan dan perkotaan.

2. Drainase

Dalam tahapan pembangunan infrastruktur, pembangunan drainase merupakan suatu pembangunan infrastruktur yang harus di bangun oleh

pemerintah, dengan terbangunnya drainase di sekitaran pelosok tempat tinggal masyarakat, tentu dapat mengantisipasi di saat curah hujan yang terlalu tinggi dan dapat mengakibatkan banjir di sekitar tempat tinggal masyarakat. Dengan adanya drainase yang memadai, air hujan dapat mengalir dengan lancar, mencegah genangan air yang dapat menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian dan rumah warga. Selain itu, drainase yang baik dapat mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh genangan air, seperti demam berdarah dan malaria. Keberadaan drainase akan memberikan rasa aman dan ketentraman bagi masyarakat, karena mereka tidak perlu khawatir terhadap banjir yang dapat merusak harta benda dan mengganggu kegiatan sehari-hari. Infrastruktur drainase yang efektif juga akan membantu menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

3. Posyandu

Posyandu di Desa Ponggi merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Dengan adanya fasilitas ini, ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, sementara orang tua dapat memantau pertumbuhan balita mereka. Posyandu juga berfungsi sebagai tempat edukasi kesehatan bagi masyarakat, memberikan informasi mengenai gizi, imunisasi, serta perawatan kesehatan lainnya. Infrastruktur ini sangat penting, karena memberikan kemudahan akses layanan kesehatan tanpa harus pergi jauh ke fasilitas kesehatan yang lebih besar. Pembangunan posyandu ini memberikan kenyamanan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, karena dapat memperoleh layanan

kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau dan tanpa menghabiskan banyak waktu untuk perjalanan.

Dari uraian hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa meskipun belum semua infrastruktur di Desa Ponggi terealisasi secara menyeluruh, pembangunan yang telah tercapai seperti rabat jalan, drainase, dan posyandu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya infrastruktur dasar ini, masyarakat merasa lebih mudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam hal mobilitas, kesehatan, maupun kenyamanan. Pembangunan ini bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menciptakan rasa aman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka.

3. Hambatan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara

Dalam proses pembangunan tentu tidak dapat terealisasikan secara menyeluruh dan massif sehingga pihak pemerintah desa dalam menangani hal tersebut tentu harus mempunyai langkah-langkah yang kemudian harus di susun agar pembangunan yang terdapat di daerah tersebut dapat terealisasi secara menyeluruh. Dalam tahapan proses pembangunan infrastruktur yang terdapat di Desa Ponggi, tentu mempunyai beberapa infrastruktur yang belum di benahi seperti drainase, jalan, dan beberapa bangunan-bangunan lainnya. Hal tersebut dapat menjadikan suatu kemunduran bagi masyarakat dalam hal pendapatan ekonomi.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan desa merupakan salah satu rangkaian dasar dalam keberhasilan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Salah satu fungsi pemerintah yang dikemukakan oleh Mirwan yaitu fungsi perencana & pembangunan. Pemerintah sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan. Pembangunan Infrastruktur di Desa Ponggi yang menggunakan anggaran sebesar Rp 758.010.959 yang bersumber dari APBN dan APBD dalam pengerjaannya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi baik berupa faktor faktor penghambat:

Dalam pelaksanaan pembangunannya, pemerintah desa tidak mampu membiayai semua perencanaan pembangunan yang ada, oleh karena itu adanya dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi. Meskipun dalam pelaksanaannya belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, namun pemerintah Desa Ponggi mengungkapkan bahwa faktor utama pendukung pembangunan di Desa Ponggi adalah Dana.

Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah Desa Ponggi sejak tahun 2023, membuat pembangunan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Desa Ponggi.

“Tentu faktor utamanya adalah Dana, meskipun terlihat masih kurang karena target perencanaan tidak sepenuhnya terpenuhi namun dengan bantuan dana sebenarnya sudah cukup membantu kami membangun infrastruktur disini secara bertahap”.⁶³

⁶³ Tajuddin, Sekertaris Desa, "wawancara" tanggal 13 Oktober 2024

Meskipun belum maksimal namun partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Ponggi merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya beberapa program tahunan yang direncanakan. Keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan desa. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Ponggi:

“Faktor pendukung yang lain adalah partisipasi masyarakat, walau belum maksimal namun keterlibatan masyarakat dalam memberikan ide dan masukan terhadap permasalahan yang mereka hadapi, sangat membantu dalam penyusunan rencana kerja agar pembangunan dilaksanakan benar-benar untuk kebutuhan masyarakat.”⁶⁴

Terbitnya UU Desa dan Permendagri no. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ponggi.

“Dengan adanya UU Desa yang memberi kewenangan pada Desa untuk membangun Desanya sendiri serta peraturan yang secara khusus memuat pedoman pembangunan Desa menjadi landasan untuk melaksanakan pembangunan Desa.”⁶⁵

Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pengawasan sangat diperlukan guna menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak penyelenggara pembangunan. Kurangnya pengawasan yang maksimal menjadi penghambat dalam proses pembangunan. Hal tersebut seperti dikemukakan Kepala Dusun 1:

⁶⁴ Tajuddin, Sekertaris Desa, ”wawancara” tanggal 13 Oktober 2024

⁶⁵ Tajuddin, Sekertaris Desa, ”wawancara” tanggal 13 Oktober 2024

“Kurangnya pengawasan yang dilakukan masyarakat itu menjadi salah satu faktor penghambat, karena kebiasaan seperti itu dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk berbuat curang”⁶⁶

Kondisi alam sangat berpengaruh dalam melaksanakan pembangunan di Desa Ponggi. Keadaan iklim di Desa Ponggi sama dengan keadaan iklim yang ada di Kolaka Utara pada umumnya yang terdiri dari musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Yang menjadi permasalahan keadaan cuaca yang tidak menentu. Cuaca merupakan kendala yang tidak bisa ditebak karena setiap saat dapat berubah membuat pelaksanaan program pembangunan dapat mundur dari jadwal yang direncanakan, ditambah dengan medan yang sulit untuk dijangkau terutama saat musim hujan tiba.

“Yang menghambat itu salah satunya cuaca, karena cuaca disini tidak menentu jadi biasanya waktu pelaksanaannya menjadi tertunda dari jadwal seharusnya, ditambah lagi medan yang sulit dijangkau oleh kendaraan besar.”⁶⁷

Harga bahan material yang tidak menentu menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur karena membuat pengeluaran pembangunan tidak sesuai dengan RAB yang telah disetujui. Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Ponggi:

“Harga bahan yang tiba-tiba naik juga menjadi hambatan tersendiri, karena kenaikannya bisa berdampak dengan RAB yang ada”⁶⁸

⁶⁶ Marta, Kepala Dusun 1, “wawancara” tanggal 13 Oktober 2024.

⁶⁷ Rustam Jangtki, Tokoh Masyarakat, “wawancara” tanggal 13 Oktober 2024

⁶⁸ Mustamin, Kepala Desa, “wawancara” tanggal 13 Oktober 2024.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, merupakan upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebutuhan dasar. Infrastruktur yang dibangun mencakup jalan desa, fasilitas irigasi, serta sarana kesehatan dan pendidikan. Proses pembangunan diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa (musdes), yang bertujuan untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pendanaan pembangunan sebagian besar bersumber dari Dana Desa, ditambah dengan kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta swadaya masyarakat.

Saat ini pembangunan infrastruktur telah menjadi topik yang banyak diperdebatkan karena para ahli dari berbagai negara telah menggunakan aspek pembangunan infrastruktur sebagai parameter dan indeks untuk mengukur kemampuan setiap negara secara global.⁶⁹ Hal ini dikarenakan akses terhadap fasilitas dasar yang memadai dipandang sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat di negara manapun. Pembangunan infrastruktur juga merupakan aspek kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja pemimpin di suatu negara.⁷⁰ Oleh karena itu, diskusi mengenai konsep dan definisi pembangunan infrastruktur harus

⁶⁹ A Opawole, J O Bababola, and S O Babatunde, "Evaluasi Kontribusi Profesional Konstruksi Dalam Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Di Nigeria," *Jurnal Internasional Rekayasa & Teknologi Konstruksi Berkelanjutan* 3, no. 2 (2020): 83–95.

⁷⁰ O A Oyedele, "Tantangan Pembangunan Infrastruktur Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Demokratis," *Prosiding Ekonomi Dan Manajemen Konstruksi* 1 (2020): 1–15, https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2012/papers/ts01c/TS0.

mempertimbangkan sudut pandang para peneliti dari berbagai latar belakang. Pertimbangan ini sangat penting untuk memudahkan pemahaman tentang konsep pembangunan infrastruktur. Peneliti lain berpendapat dalam bukunya bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi jika pembangunan tersebut ingin dilakukan di negara manapun. Melihat investasi infrastruktur sebagai investasi yang dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.⁷¹

Pembangunan infrastruktur tidak lain adalah mekanisme yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari sisi ekonomi, pembangunan infrastruktur dapat berdampak pada tingkat penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pendapatan serta memberikan nilai tambah. Pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan integrasi politik dan mengurangi kesenjangan geografis masyarakat. Konsep pembangunan infrastruktur juga mengacu pada penyediaan fasilitas infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan raya dan jalan tol, ketersediaan transportasi, jembatan, dan pelabuhan serta sistem telekomunikasi.⁷² Pembangunan fisik dasar yang disebutkan di atas dianggap penting karena menjadi indikator kemajuan dan proses pembangunan suatu negara. Kurangnya fasilitas dasar menunjukkan bahwa negara atau wilayah tersebut dapat dikategorikan sebagai negara terbelakang dan tertinggal dari kemajuan dan modernisasi.

Konsep pembangunan infrastruktur juga mengacu pada penyediaan fasilitas infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan raya dan jalan tol,

⁷¹ Awal N Bahasoan, *Pengaruh Ekonomi Dalam Pembangunan Investasi Infrastruktur Sulawesi Tengah* (Penerbit Qiara Media, 2022), 29.

⁷² F J Cronin et al., "Implikasi Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dari Telekomunikasi," *Telecommunications Policy* 19, no. 7 (2020.): 545–559.

ketersediaan transportasi, jembatan, dan pelabuhan serta sistem telekomunikasi.⁷³ Pembangunan fisik dasar yang disebutkan di atas dianggap penting karena menjadi indikator kemajuan dan proses pembangunan suatu negara. Kurangnya fasilitas dasar menunjukkan bahwa negara atau wilayah tersebut dapat dikategorikan sebagai negara terbelakang dan tertinggal dari kemajuan dan modernisasi.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa membentuk tim pelaksana pembangunan desa (TPPD) yang bertanggung jawab atas teknis pembangunan. Masyarakat juga berperan aktif melalui kegiatan gotong royong, seperti membantu pengerjaan fisik infrastruktur. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan *monitoring* berkala, sedangkan evaluasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat guna mendapatkan umpan balik mengenai manfaat infrastruktur yang dibangun. Pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi telah melibatkan berbagai elemen masyarakat dan perangkat desa untuk mencapai keberhasilan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Melalui pendekatan gotong royong dan pemanfaatan sumber daya lokal, pelaksanaan pembangunan berjalan meskipun belum sepenuhnya menyeluruh. Terealisasinya beberapa infrastruktur seperti jalan rabat beton, posyandu, dan puskesmas menunjukkan bahwa fokus pemerintah desa diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat.

Namun, implementasi pembangunan ini menghadapi beberapa kendala yang perlu disoroti, seperti ketidakmerataan pembangunan di seluruh wilayah

⁷³ F J Cronin et al., "Implikasi Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dari Telekomunikasi," *Telecommunications Policy* 19, no. 7 (2020.): 545–559.

desa. Sebagian masyarakat di daerah tertentu belum menikmati akses yang memadai akibat terbatasnya anggaran dan kendala teknis. Kendala lain adalah kesulitan memperoleh lahan untuk pembangunan jalan baru karena keengganan warga untuk menghibahkan tanah mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Ponggi, perencanaan pembangunan telah melibatkan usulan masyarakat melalui forum musyawarah desa. Namun, pelaksanaan di lapangan kerap terganggu oleh faktor cuaca, terutama pada musim hujan yang menghambat konstruksi. Meskipun demikian, masyarakat tetap merasa bersyukur dengan adanya infrastruktur dasar yang telah dibangun, karena secara langsung mendukung aktivitas ekonomi dan sosial mereka, seperti mempermudah transportasi hasil pertanian dan akses layanan kesehatan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi merupakan langkah strategis yang perlu terus ditingkatkan melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif agar dampaknya lebih optimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

2. Dampak Sosial Ekonomi pada Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara

Pertumbuhan ekonomi pedesaan yang cepat ditentukan oleh aksesibilitas dan penyediaan infrastruktur penting seperti jalan yang baik. Pentingnya infrastruktur jalan untuk mengembangkan ekonomi di daerah tertentu telah ditekankan secara khusus di daerah-daerah yang sedang berkembang pesat⁷⁴. Dampak ekonomi yang paling nyata adalah peningkatan efisiensi distribusi hasil

⁷⁴ D H Brooks and E C Go, "Peran Infrastruktur Dalam Menopang Pertumbuhan Asia," *ADB Economic Working Paper Series* 294 (2020): 1–43.

pertanian. Sebagian besar masyarakat Desa Ponggi bekerja sebagai petani, dan keberadaan jalan rabat beton mempermudah mereka mengangkut hasil pertanian ke pasar terdekat. Hal ini mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan daya tawar produk mereka, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani.

Kadir yang meneliti dampak pembangunan infrastruktur transportasi darat terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia menemukan bahwa investasi infrastruktur transportasi darat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang negara tersebut.⁷⁵ Studi ini juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam mengembangkan beberapa sektor penting di negara ini seperti sektor manufaktur, jasa, perdagangan internasional, produksi dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti infrastruktur jalan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan melalui penyediaan fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat⁷⁶.

Meskipun demikian, pentingnya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat pedesaan lebih difokuskan pada pertumbuhan sektor pertanian yang identik dengan sumber daya ekonomi utama masyarakat pedesaan⁷⁷. Kemajuan dalam aspek infrastruktur dasar bagi masyarakat pedesaan dipandang sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan yang hal ini pada

⁷⁵ S.A.S.U. Kadir, "Dampak Infrastruktur Pengangkutan Darat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kajian Kes Malaysia," *Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Melayu Malaysia PERKEM* 8, no. 3 (2020): 1536–1545.

⁷⁶ E Simkova, "Pembangunan Berkelanjutan Daerah Pedesaan Dan Peran Pariwisata," *Ekonomie* 11, no. 1 (2020): 26–32.

⁷⁷ B Ndulu, "Infrastruktur, Integrasi Regional Dan Pertumbuhan Di Afrika Sub-Sahara: Menghadapi Kelemahan Geografi Dan Fragmentasi Kedaulatan," *Jurnal Ekonomi Afrika* 15, no. 2 (2020): 212–244.

gilirannya akan memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.⁷⁸ Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur jalan dipandang sebagai kunci untuk pembangunan di daerah pedesaan karena dengan adanya pembangunan ini, fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi akan dibawa ke daerah pedesaan juga.⁷⁹

Pemerintah Malaysia berkomitmen untuk mengembangkan daerah pedesaan dengan membentuk berbagai kementerian terkait seperti Departemen Pekerjaan Umum Malaysia dan Kementerian Pembangunan Pedesaan dan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pengembangan infrastruktur, utilitas, dan fasilitas dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.⁸⁰ Selain itu, pembangunan jalan rabat beton juga berperan dalam memperkuat interaksi sosial antarwarga. Dengan akses jalan yang lebih baik, masyarakat menjadi lebih mudah menjalin komunikasi dan kerjasama dalam berbagai kegiatan desa. Hal ini sejalan dengan pandangan Calderon dan Egbetokun bahwa infrastruktur dasar tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi tetapi juga memperkuat kohesi sosial dalam komunitas.⁸¹

Dampak dari pembangunan infrastruktur juga terkait dengan kualitas pelayanan sosial terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan secara umum. Dari sisi sosial, pembangunan infrastruktur

⁷⁸ M O Ale et al., "Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Ketahanan Pangan Dan Kemacetan Kota Di Nigeria," *Jurnal Penelitian Pembangunan Nasional (JORIND)* 1, no. 9 (2020): 124–130.

⁷⁹ J Straka and M Tuzova, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Daerah Pedesaan Di Republik Ceko: Sebuah Tinjauan Literatur," *Procedia - Ilmu Sosial Dan Perilaku* 220 (2020): 496–505, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.525>.

⁸⁰ Portal Rasmi Kementerian Kemajuan Luar Bandar Wilayah, "No Title," n.d.

⁸¹ Nirwasita Daniswara and Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "Kohesi Sosial Dan Ekonomi Dalam Pertanian Porang Di Desa Selur, Ponorogo," *Jurnal of Economics and Policy Studies* 5, no. 1 (2024): 55–65.

seperti posyandu dan puskesmas memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Posyandu, misalnya, menjadi pusat layanan bagi ibu dan anak, membantu menurunkan tingkat *stunting* dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan sejak dini. Puskesmas juga memberikan akses kesehatan yang lebih mudah dan cepat, terutama untuk masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Nigeria oleh Calderon dan Egbetokun yang menemukan bahwa infrastruktur dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan perdesaan karena pembangunan infrastruktur tersebut terintegrasi dengan semua aspek lainnya, termasuk pertanian, pendidikan, kesehatan, gizi, listrik dan air bersih, yang kemudian dikembangkan secara bersamaan. Pembangunan infrastruktur dasar di perdesaan dipandang sebagai pendekatan holistik yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan ketimpangan dan keadilan sosial di perdesaan secara umum.⁸²

Pentingnya infrastruktur untuk daerah pedesaan juga telah dibahas oleh Adeyoye, Yusuf, Balogun & Carim-sanni.⁸³ Kurangnya fasilitas dasar merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat pedesaan dan juga merupakan faktor yang dapat menghambat upaya peningkatan transformasi ekonomi masyarakat pedesaan yang umumnya mengandalkan sumber daya pertanian. Aziz berpendapat yang melakukan penelitian mengenai hubungan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di India mengungkapkan bahwa

⁸² C Calderon and L Serve, "Infrastruktur Dan Pembangunan Ekonomi Di Afrika Sub-Sahara" (Washington, DC: Bank Dunia, 2020), 197.

⁸³ A Adeoye et al., "Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Dan Profitabilitas Petani Di Bawah Proyek Fadama-II Di Negara Bagian Oyo, Nigeria," *Pengamatan Pedesaan Dunia. Science Publication* 3, no. 2 (2020): 1–10.

infrastruktur dasar sangat penting untuk kualitas hidup yang baik terutama dalam aspek sosial ekonomi.⁸⁴ Kurangnya fasilitas dasar di daerah pedesaan memiliki dampak negatif langsung pada penduduk desa seperti meningkatkan tingkat kemiskinan, penurunan hasil pertanian dan menghambat kemampuan untuk melanjutkan kehidupan yang baik. Semua dampak negatif tersebut tentu saja akan mempengaruhi pelayanan kesehatan dan akses pendidikan bagi masyarakat desa.

Kebutuhan untuk mengembangkan fasilitas dasar untuk daerah pedesaan harus dipertimbangkan sebagai bagian dari pembangunan secara keseluruhan yang harus mencakup pertumbuhan ekonomi, peningkatan layanan kesehatan, akses pendidikan dan pengembangan masyarakat itu sendiri. Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas baik dapat menjaga keseimbangan kualitas hidup antara wilayah pedesaan dan perkotaan.⁸⁵ Penyediaan infrastruktur dasar yang cukup dan efisien merupakan dasar dari kualitas hidup yang baik di kalangan masyarakat pedesaan. Pembangunan infrastruktur dasar di daerah pedesaan seperti jalan dapat dianggap sebagai media komunikasi antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat luar.⁸⁶

Pembangunan infrastruktur dasar yang efisien akan meningkatkan akses untuk alat komunikasi sosial, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Para penulis juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur bagi

⁸⁴ A Aziz, "Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi Di Pedesaan India," *The International Journal Research Publications* 5, no. 1 (2020): 15–21.

⁸⁵ J S Bulus and J O Adefila, "Studi Tentang Fasilitas Infrastruktur Pedesaan Di Daerah Kajuru, Negara Bagian Kaduna, Nigeria: Analisis Spasial Untuk Perencanaan," *Jurnal Internasional Humaniora Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2020): 286–295.

⁸⁶ Noviyanti Noviyanti and Ilham Mirzaya Putra, "Dampak Perbaikan Jalan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Darma Agung* 31, no. 3 (2023): 178–197.

masyarakat desa untuk mengubah kebijakan isolasi dan keterasingan. Hal ini dapat diwujudkan dengan tersedianya jaringan jalan yang memungkinkan adanya kontak dengan orang lain. Akses ke perangkat komunikasi seperti telepon yang akan meningkatkan akses masyarakat pedesaan komunikasi dengan dunia luar, termasuk dunia tanpa batas. Pandangan ini sejalan dengan definisi Anderson & Taylor mengenai globalisasi sebagai sebuah proses yang meningkatkan jaringan dan ketergantungan antar masyarakat.⁸⁷ World Economic Forum menekankan pentingnya meningkatkan infrastruktur dasar karena kemajuan dalam aspek ini akan mengurangi isolasi di antara daerah-daerah yang berbeda dan juga dapat mengintegrasikan pasar lokal dan ekonomi lokal dengan biaya yang minimal, tidak seperti di masa lalu.⁸⁸

Pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi memberikan dampak signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak ini dapat dilihat dari peningkatan aksesibilitas, produktivitas ekonomi, serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Infrastruktur yang telah dibangun seperti jalan rabat beton, puskesmas, dan posyandu menjadi katalis utama bagi perubahan sosial dan ekonomi di desa ini.

Dalam konteks pembangunan jalan rabat beton, dampaknya sudah dirasakan oleh para petani yang dapat mengangkut hasil bumi ke pasar dengan lebih efisien. Hal ini sejalan dengan penelitian Septiana, dkk. bahwa infrastruktur tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi,

⁸⁷ V Z Rozema and P Martens, "Kerangka Kerja Indikator Adaptif Untuk Memantau Pembangunan Berkelanjutan Regional: Studi Kasus Proyek INSURE Di Limburg, Belanda," *Berkelanjutan: Ilmu Pengetahuan, Praktik & Kebijakan* 6, no. 1 (2020): 6–17.

⁸⁸ B Yilmaz et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Pedesaan Di Turki: Studi Kasus Bartin," *Kebijakan Dan Ekonomi Kehutanan* 12, no. 4 (2020): 239–249.

meningkatkan efisiensi distribusi barang, serta mengurangi biaya logistik.⁸⁹ Posyandu dan puskesmas yang telah dibangun memberikan dampak sosial yang signifikan, terutama pada peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi menunjukkan bahwa investasi pada fasilitas dasar mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Dengan perencanaan yang baik dan pelibatan masyarakat secara aktif, dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan ini dapat terus diperkuat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Hambatan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi telah membawa perubahan sosial-ekonomi yang signifikan di masyarakat. Pembangunan yang dipelopori oleh pemerintah daerah ini secara umum diterima dengan baik dan berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan desa. Perbaikan utama meliputi peningkatan dalam hal infrastruktur jalan, dan penyediaan puskesmas pembantu (pustu), yang kesemuanya telah berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kenyamanan penduduk setempat. Namun, di samping hasil-hasil positif tersebut, beberapa tantangan dan konsekuensi negatif juga telah diamati.

Salah satu dampak positif yang menonjol dari pembangunan infrastruktur adalah pengaruhnya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan memfasilitasi pergerakan barang dan

⁸⁹ Septiana Aulia et al., "Analisis Peran Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang," *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi (JUPEA)* 4, no. 1 (2024), 41.

orang, proyek-proyek infrastruktur telah mendorong kegiatan ekonomi, terutama menguntungkan para petani yang merupakan sebagian besar tenaga kerja di desa.⁹⁰ Ketersediaan jaringan jalan yang memadai telah memungkinkan para petani untuk mengangkut hasil pertanian mereka secara lebih efisien ke pasar-pasar di perkotaan, sehingga meningkatkan tingkat pendapatan mereka dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Terlepas dari hasil positif tersebut, proses pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya. Hambatan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, terutama dipengaruhi oleh faktor sosial dan geografis. Hambatan sosial yang utama adalah keengganan sebagian masyarakat untuk menghibahkan lahan mereka untuk pembangunan jalan baru. Ketidaksiapan ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran mengenai manfaat jangka panjang dari infrastruktur serta potensi konflik kepentingan terkait kepemilikan lahan. Keengganan ini menjadi penghalang bagi realisasi proyek infrastruktur secara menyeluruh dan menggarisbawahi pentingnya pelibatan masyarakat dan pembangunan konsensus dalam proses pembangunan. Selain itu, Desa Ponggi memiliki kondisi geografis berupa bukit berbatu dan lembah terjal, yang membuat pembangunan jalan dan fasilitas lainnya menjadi sulit. Wilayah ini juga sering menghadapi kondisi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat yang menghambat proses konstruksi dan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur yang sudah dibangun. Gangguan terkait cuaca ini menggarisbawahi perlunya

⁹⁰ A Mascarenhas et al., "Peran Indikator Lokal Umum Dalam Penilaian Keberlanjutan Regional," *Indikator Ekologi* 10, no. 3 (2020): 646–656.

strategi adaptif dan mekanisme perencanaan yang kuat untuk memitigasi dampak faktor lingkungan terhadap proyek-proyek pembangunan.

Secara keseluruhan, penelitian ini sejalan dengan dampak sosial-ekonomi dari pembangunan infrastruktur di Desa Janggurara terlihat jelas di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan. Meskipun masih ada tantangan, hasil positif menggarisbawahi pentingnya pembangunan infrastruktur dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan kemajuan sosial-ekonomi.⁹¹ Hambatan-hambatan tersebut tidak menghalangi terwujudnya beberapa pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti jalan rabat beton, posyandu, dan puskesmas. Pembangunan ini telah memberikan dampak positif terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, terutama dalam mempermudah transportasi hasil pertanian dan meningkatkan akses layanan kesehatan.

Hambatan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi dapat diatasi dengan cara bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat, melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan, serta menggunakan strategi yang sesuai dengan kondisi geografis desa. Dengan pendekatan ini, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Nourmala Chandra Nuriyah yang menunjukkan bahwa kolaborasi multi-stakeholder, seperti dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau sektor swasta, dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kualitas hasil.

⁹¹ T Hlavsa, "Kemungkinan Penilaian Kompleks Terhadap Pengembangan Dan Kategorisasi Wilayah Pedesaan," *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 58, no. 6 (2020): 151–160.

Di Desa Ponggi, penguatan koordinasi dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau pemangku kepentingan lain dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien.⁹²

⁹² Chandra Nuriyah and Nuril Lizar, “Pembangunan Infrastruktur Desa: Pemberdayaan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal Di Desa Sumberarum Bojonegoro Village Infrastructure Development: Community Empowerment and Its Impact on Local Economic Growth in Sumberarum Village .”, 53-58.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan mengenai Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara yaitu dalam tahapan proses pembangunan infrastruktur yang terdapat di Desa Ponggi.

1. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara

Secara umum pembangunan di Desa Ponggi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi masih perlu untuk ditingkatkan dilihat dari pelaksanaannya di tahun anggaran 2023 masih terdapat beberapa kendala yang di alami. Dalam tahap perencanaan, pemerintah Desa Ponggi memfokuskan pada pembangunan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi darat masyarakat. Hal itu sudah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu, meski belum maksimal namun terlihat partisipasi masyarakat sudah cukup baik dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah mulai dari musyawarah dusun, musyawarah Lembang hingga Musyawarah perencanaan pembangunan Lembang. Pada tahun anggaran 2023 pembangunan yang terlaksana hanya 4 program yang dikondisikan dengan dana yang tersedia. Dalam tahap ini pelaksanaan partisipasi masyarakat masih kurang, yang ikut berpartisipasi hanya sebagian masyarakat yang digaji untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Selain itu dalam

pelaksanaannya pemerintah Desa tidak transparansi dalam penggunaan dana selama pembangunan, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk berbuat curang.

2. Dampak Sosial Ekonomi pada Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara

Dengan pembangunan tersebut, maka memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Dimana infrastruktur jalan sangat berpengaruh terhadap pendidikan dan kesehatan, karena akses jalan yang baik dapat mendukung kelancaran aktifitas masyarakat. Selain itu, juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang dimana sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi warga. Dimana dengan adanya rabat jalan yang dilalui petani dapat memudahkan dan melancarkan akses jalan menuju lahan pertanian yang dapat mempermudah petani untuk mengangkut hasil bumi yang dapat dijual diperkotaan.

3. Hambatan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara

Faktor penghambat yaitu segala hal yang menghalangi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi adalah, belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, cuaca dan medan, serta harga bahan material yang tidak menentu. Dalam pengawasan dan pembangunan Pemerintah Daerah sudah melakukan pengawasan terhadap pemerintah Desa Ponggi namun pengawasan yang dilakukan masyarakat masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas mulai dari perencanaan sampai evaluasi.

Dari pemaparan tersebut sangatlah penting peran pemerintah untuk memberikan kesenjangan hidup kepada masyarakat agar masyarakat setempat dapat hidup sejahtera. Melalui pembangunan infrastruktur kebijakan pemerintah desa harus mengetahui dampak sosial ekonomi masyarakat kelas bawah sampai kelas atas. Dengan cara pemetaan tersebut pemerintah dapat melihat peluang kepada masyarakat.

B. Saran

Kepada segenap para masyarakat Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara di harapkan agar kiranya dapat bersinergi dengan pemerintah setempat untuk saling menjaga pembangunan infrastruktur yang telah di sediakan oleh pemerintah setempat. Untuk pemerintah setempat di dalam proses tahapan pembangunan infrastruktur agar kiranya dapat teliti, dan harus selalu terjun ke masyarakat untuk berdialog, sehingga keluhan dan keresahan masyarakat dari segi ekonomi dan sosial dapat tersalurkan, sehingga dapat tercipta tatanan masyarakat adil, sejahtera, dan makmur. Teruntuk kepada pemuda Desa Ponggi, agar dapat membantu pemerintah setempat untuk selalu mengingatkan dan menjadi teman berfikir secara kreatif demi terwujudnya kenyamanan dan ketentraman bersama-sama. dampak pembangunan infrastruktur di perdesaan tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, namun juga pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan. Pembangunan infrastruktur di perdesaan membutuhkan kolaborasi dan integrasi antara semua pihak terkait terutama perencana pembangunan dan pekerja sosial masyarakat. Kolaborasi

antara pihak-pihak terkait dan masyarakat pedesaan sangat penting dalam mencapai keberhasilan program pembangunan masyarakat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeoye, A, S A Yusuf, O L Balogun, and A Carim-sanni. "Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Dan Profitabilitas Petani Di Bawah Proyek Fadama-II Di Negara Bagian Oyo, Nigeria." *Pengamatan Pedesaan Dunia. Science Publication* 3, no. 2 (n.d.): 1–10.
- Agustina, Siti, Zainudin Saenong, and La Tondi. "Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan)." *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology And Entrepreneur* 1, no. 03 (2022): 205–15.
- Ale, M O, T A Abisuwa, F O Olagunagba, and O Ijarotimi. "Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Ketahanan Pangan Dan Kemacetan Kota Di Nigeria." *Jurnal Penelitian Pembangunan Nasional (JORIND)* 1, no. 9 (n.d.): 124–130.
- Asep Deni, M M, Ira Amanda Hirbasari, S E Taryono, M Subhan Iswahyudi, S E Heppi Syofya, S E Socharjoto, and S E Humaidah Muafiqie. *PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN*. CV Rey Media Grafika, 2024.
- Aulia, Septiana, Sabrina Nur Anisa, Afreizka Indah, M Arif Krui Dipa, and Maya Panorama. "Analisis Peran Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang." *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi (JUPEA)* 4, no. 1 (2024).
- Aziz, A. "Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi Di Pedesaan India." *The International Journal Research Publications* 5, no. 1 (n.d.): 15–21.
- Bahasoan, Awal N. *Pengaruh Ekonomi Dalam Pembangunan Investasi Infrastruktur Sulawesi Tengah*. Penerbit Qiara Media, 2022.
- Brooks, D H, and E C Go. "Peran Infrastruktur Dalam Menopang Pertumbuhan Asia." *ADB Economic Working Paper Series* 294 (n.d.): 1–43.
- Budiono. "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Perekonomian Desa." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5, no. 2 (2018): 45–58.
- Bulus, J S, and J O Adefila. "Studi Tentang Fasilitas Infrastruktur Pedesaan Di Daerah Kajuru, Negara Bagian Kaduna, Nigeria: Analisis Spasial Untuk Perencanaan." *Jurnal Internasional Humaniora Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (n.d.): 286–295.
- Calderon, C, and L Serve. "Infrastruktur Dan Pembangunan Ekonomi Di Afrika Sub-Sahara." Washington, DC: Bank Dunia, n.d.
- Chandra Nuriyah, Nourmala, and Sofi Nuril Lizar. "Pembangunan Infrastruktur Desa: Pemberdayaan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal Di Desa Sumberarum Bojonegoro Village Infrastructure Development: Community Empowerment and Its Impact on Local Economic Growth in Sumberarum Village ." *Jurnal Suara Politik* 2, no. 2 (2023): 53–

- Cronin, F J, P M McGovern, M R Miller, and E B Parker. "Implikasi Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dari Telekomunikasi." *Telecommunications Policy* 19, no. 7 (n.d.): 545–559.
- Daniswara, Nirwasita, and Muhammad Alhada Fuadilah Habib. "Koheresi Sosial Dan Ekonomi Dalam Pertanian Porang Di Desa Selur, Ponorogo." *Juornal of Economics and Policy Studies* 5, no. 1 (2024): 55–65.
- Dienyah, Firdha. "Kontribusi Infrastruktur Terhadap PDRB Provinsi Di Pulau Sumatra." *Universitas Bandar Lampung*, 2016, 18–38.
- Doni Septian, Okparizan. "Kewenangan Kelurahan Pasca Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah"," n.d.
- Fathori. "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pembangunan Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Lokal." *Multifinance* 1, no. 1 (2023): 20–30.
- Gai, Ardiyanto Maksimilianus, Agung Witjaksono, and Riska Rahma Maulida. "Perencanaan Dan Pengembangan Desa." *Dream Litera Buana*, 2020.
- Guampe, Feliks Arfid, Umar, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Nur, Ardhana Jaanuar Mahardhani, Fachrul Husain Habibie, Andi Hartati, et al. *PEMBANGUNAN PEDESAAN (Prinsip, Kebijakan Dan Manajemen). Widina Bhakti Persada Bandung*. Vol. 3, 2022.
- Hasibuan, Syarifah Ainun. "Kajian Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Pekanbaru," 2020.
- Hendra Safri, Adzan Noor Bakri, Nur Arjani Aqidah. "Pendampingan Pelatihan Aplikasi Manajemen Adminitrasi Dan Keuangan Desa Oleh Program Studi Perbankan Syariah Di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu" 4, no. 2 (2024): 12–27.
- Hlavsa, T. "Kemungkinan Penilaian Kompleks Terhadap Pengembangan Dan Kategorisasi Wilayah Pedesaan." *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 58, no. 6 (n.d.): 151–160.
- Husen, Amran, and Aisyah S Baranyanan. "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan, Infrastruktur Jalan Dan Infrastruktur Jembatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara." *Poros Ekonomi* 10, no. 1 (2021).
- Kadir, S.A.S.U. "Dampak Infrastruktur Pengangkutan Darat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kajian Kes Malaysia." *Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Melayu Malaysia PERKEM* 8, no. 3 (n.d.): 1536–1545.
- "Kantor Kepala Desa Ponggi Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara," 2024.
- Kuncoro, Mudrajad. *Dasar Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta UPP

STIM YKPN, n.d.

Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, 1991.

Mansur, Muhammad Tahmid Nur, Fasiha, M Ihsan Darwis. “Kebijakan Dana Desa Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Perspektif Al Masalah Al Mursalah” 14 (2024): 123–36.

Mantiri, Jeane. *Manajemen Pembangunan Daerah. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2014.

Mascarenhas, A, P Coelho, E Subtil, and T B Ramos. “Peran Indikator Lokal Umum Dalam Penilaian Keberlanjutan Regional.” *Indikator Ekologi* 10, no. 3 (n.d.): 646–656.

Ndulu, B. “Infrastruktur, Integrasi Regional Dan Pertumbuhan Di Afrika Sub-Sahara: Menghadapi Kelemahan Geografi Dan Fragmentasi Kedaulatan.” *Jurnal Ekonomi Afrika* 15, no. 2 (n.d.): 212–244.

Noviyanti, Noviyanti, and Ilham Mirzaya Putra. “Dampak Perbaikan Jalan Terhadap Kondisi Social Ekonomi Masyarakat Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.” *Jurnal Darma Agung* 31, no. 3 (2023): 178–97.

Nurchahaya. “Dampak Dana Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara).” *Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2021.

Ompusunggu, Vina Maria. “Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo.” *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 3, no. 2 (2018).

Opawole, A, J O Bababola, and S O Babatunde. “Evaluasi Kontribusi Profesional Konstruksi Dalam Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Di Nigeria.” *Jurnal Internasional Rekayasa & Teknologi Konstruksi Berkelanjutan* 3, no. 2 (n.d.): 83–95.

Oyedele, O A. “Tantangan Pembangunan Infrastruktur Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Demokratis.” *Prosiding Ekonomi Dan Manajemen Konstruksi* 1 (n.d.): 1–15.

Revida, Erika. “Konsep Dasar Manajemen Pembangunan.” *Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi Dan Inovasi* 1, no. 1 (2021): 10–15.

Rozema, V Z, and P Martens. “Kerangka Kerja Indikator Adaptif Untuk Memantau Pembangunan Berkelanjutan Regional: Studi Kasus Proyek INSURE Di Limburg, Belanda.” *Berkelanjutan: Ilmu Pengetahuan, Praktik & Kebijakan* 6, no. 1 (n.d.): 6–17.

Sari, Novita, Jauhar Arifin, and Heni Suparti. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.” *JAPB* 3, no. 2 (2020): 496.

- Simkova, E. "Pembangunan Berkelanjutan Daerah Pedesaan Dan Peran Pariwisata." *Ekonomie* 11, no. 1 (n.d.): 26–32.
- Straka, J, and M Tuzova. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Daerah Pedesaan Di Republik Ceko: Sebuah Tinjauan Literatur." *Procedia - Ilmu Sosial Dan Perilaku* 220 (n.d.): 496– 505. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.525>.
- Suharsmi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, n.d.
- Tjilen, Alexander Phuk. *Konsep, Teori Dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Nusamedia, 2019.
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).
- Utara, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka. "Statistik Daerah Kabupaten Kolaka Utara 2022." BPS Kabupaten Kolaka Utara, 2022.
- Wilayah, Portal Rasmi Kementerian Kemajuan Luar Bandar. "No Title," n.d.
- Wirawan, Dr Ib. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial*. Kencana, 2012.
- Yilmaz, B, I Desdemir, E Atmis, and W Lise. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Pedesaan Di Turki: Studi Kasus Bartin." *Kebijakan Dan Ekonomi Kehutanan* 12, no. 4 (n.d.): 239–249.
- Zahra, Karin, Riris Hotma Roito Manalu, Rana Nabillah, and Putri Kemala Dewi. "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Medan Tembung." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 3 (2024): 1857–66.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara Desa Ponggiha Kec. Lasusua 93912
Tlp. (0405) 2330133 Fax. (0405) 2330133 HP / WA. 0815 800 80 816

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 000.9.2 / 196 / SKP / DPMPTSP / X / 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian dan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara serta berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kolaka Utara Nomor : 200.1.2.3/450/2024 pada tanggal 21 Oktober 2024 Perihal Penyampaian Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian, maka yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kolaka Utara memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama : **FADIL RIZAT GIOFANI**
NIM : 2004030166
Judul Penelitian : **“PERSEPSI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DAN DAMPAKNYA PADA PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA PONGGI KECAMATAN POREHU KABUPATEN KOLAKA UTARA”**
Program Studi : MANAJEMEN BISNIS ISLAM
Fakultas : ILMU EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
Lokasi Penelitian : DESA PONGGI Kecamatan Porehu Kab. Kolaka Utara
Tanggal dan atau lamanya penelitian : Mulai tanggal 21 s/d 31 Oktober 2024

Dengan ketentuan Pemegang Izin Penelitian :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/walikota Cq. Kepala Bappeda/Kesbangpol, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampul hardcopy dan softcopy laporan hasil penelitian Kepada Bupati Kolaka Utara. Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Kolaka Utara.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
6. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan 21 November 2024

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lasusua
Pada tanggal : 21 Oktober 2024

a.n. **BUPATI KOLAKA UTARA**



Tembusan Yth :

1. Bupati Kolaka Utara di Lasusua;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kolaka Utara ;
4. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Berikut daftar wawancara kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Telluwanua Kota Palopo:

A. PEMERINTAH DESA

1. Apa saja pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi?
2. Dalam tahapan proses pembangunan infrastruktur di Desa Ponggi, pembangunan apakah yang paling di prioritaskan oleh pemerintah setempat?
3. Bagaimana tahapan proses pembangunan infrastruktur di daerah ini, apakah sudah terealisasi semua atau masih ada yang dalam tahapan pengerjaan?
4. Disaat pelaksanaan pembangunan yang berjalan di daerah ini, apa yang biasanya menjadi faktor penghambat di dalam proses pengerjaannya?
5. Menurut bapak, setelah pembangunan infrastruktur telah usai dikerjakan, bagaimana dampak sosial di masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat?
6. Menurut bapak, setelah pembangunan infrastruktur telah usai dikerjakan, bagaimana dampak ekonominya terhadap pendapatan masyarakat?
7. Apa harapan Bapak untuk masyarakat yang ada di Desa Ponggi ini terkait menjaga dan memelihara semua infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah?

B. MASYARAKAT DESA PONGGI

1. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak terkait pembangunan infrastruktur di desa ini?

2. Menurut Ibu/Bapak, dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa ini, apa yang menjadi nilai plus bagi masyarakat dari segi pendapatan ekonomi?
3. Menurut Ibu/Bapak, dengan adanya pembangunan infrastruktur ini, apakah yang menjadi dampak sosial ekonomi masyarakat?
4. Apa harapan Ibu/Bapak kepada pemerintah dan segenap masyarakat terkait pembangunan infrastruktur yang terdapat di daerah ini?

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

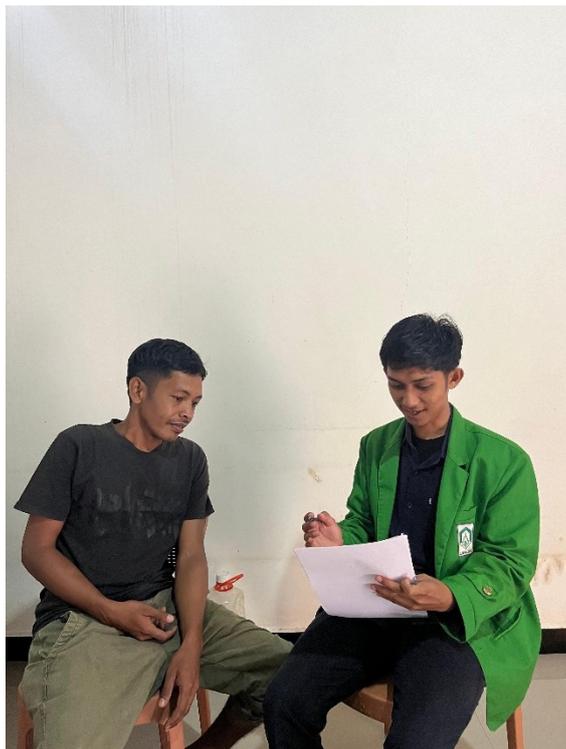
Kepala Desa



Sekertaris Desa



Kaur Perencanaan



Kaur Pemerintahan



Kepala Dusun I



Tokoh Masyarakat



Ketua LMPD



Lampiran 4 Turnitin

Dampak Sosial Ekonomi Pada Pembangunan Infrastruktur
Desa di Desa Ponggi Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka
Utara.docx

ORIGINALITY REPORT

12% SIMILARITY INDEX	12% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	5%
2	jurnal.umsb.ac.id Internet Source	<1%
3	ejournal.iaingorontalo.ac.id Internet Source	<1%
4	es.scribd.com Internet Source	<1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
6	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%

Lampiran 5 Keterangan Mahad


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Syahbath

Nomor : In.19/PP/PT/MA/HAD AL-JAMTAH/ 737 /VII/2021

Diberikan kepada :

FADIL RIZAT GIOFANI
NIM : 20 0403 0166

Setelah mengikuti Program Ma'had Al-Jam'i'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo
Sebagai tanda bukti diberikan Syahadah ini berikut hak sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dikeluarkan di Palopo pada tanggal Dua Juhdi Dua Ribu Dua Puluh Satu

Kepala Unit
Ma'had Al-Jam'i'ah IAIN Palopo


Dr. Mardiyah Takwim, MA, HI
NIP. 19680503 199803 1 005


Sektor IAIN Palopo
Dr. Abdul Piroh, MA, Ag.
NIP. 19691104 199403 1 004

Lampiran 6 Sertifikat PBAK

No. 0406/In.19/PP-PBAK/09/2020

MBS

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA:

Fadil Rizat Giofawi
sebagai:
PESERTA

pada kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)
"Membangun Cara Berpikir Moderat yang Berintegritas Heilmuan Berdiri Kearifan Lokal
untuk Menjaga NKRI Berdasarkan Pancasila"
yang dilaksanakan pada hari Ahad s.d Selasa 13-15 September 2020
di Institut Agama Islam Negeri Palopo

Rektor IAIN Palopo,

Abdul Pirol, M.Ag.

Ketua Panitia,

Muhammad Ilyas, S.Ag., MA.



Lampiran 7 Sertifikat TOEFL



Lampiran 8 Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Fadil Rizat Giofani lahir di Ponggi tanggal 8 September 2002 penulis merupakan anak ke pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Kamri dan Suharni. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Ponggi Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara penulis menyelesaikan pendidikan sekolah SD pada tahun 2014 di SDN 1 Ponggi, kemudian di tahun yang sama melanjutkan di tingkat SMPN 1 Porehu hingga tahun 2017, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Palopo setelah penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Palopo pada tahun 2020, penulis kembali melanjutkan pendidikan tingkat S1 di Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan mengambil jurusan Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Contact Person Penulis: fadilfadilrizat@gmail.com